

**ANOMALI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
Sebuah Studi di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Minat Utama Metode Ilmu Politik

Oleh:

Nabila Rahma Nugraheni

NIM. 135120500111031



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

ANOMALI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
Sebuah Studi di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Nabila Rahma Nugraheni
NIM. 135120500111031

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D

NIP: 201607 750909 1001

Habibi Subandi, S.Sos., M.A.

NIP: 19641230 199303 1 002

ANOMALI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
Sebuah Studi di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang

SKRIPSI

Disusun Oleh:
Nabila Rahma Nugraheni

NIM. 135120500111031

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif
 pada tanggal 3 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji

Sekretaris Majelis Penguji

Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D
 NIP: 201607 750909 1001

Habibi Subandi, S.Sos., M.A.
 NIP: 201304 840905 1 001

Anggota Penguji II

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Taufik Akbar, S.IP., M.IP
 NIP: 201405 851101 1 001

Wimmy Halim, S.IP., M.Sos
 NIP: 201607 900704 1 001

Malang, 3 Mei 2018

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak
 NIP. 19690814 199402 1 001

PERNYATAAN**Nama : Nabila Rahma Nugraheni****NIM. 135120500111031**

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul: *Anomali Implementasi Otonomi Desa, Sebuah Studi di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang* adalah benar-benar karya otentik saya sendiri. Gagasan-gagasan yang bukan berasal dari saya telah diberi citasi dan sumbernya telah ditulis dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Malang, 23 April 2018

Yang membuat pernyataan

Nabila Rahma Nugraheni

NIM. 135120500111031

Kata Pengantar

Bismillahirrohmanirohim

Puji syukur atas curahan rahmat serta kasih sayang Allah SWT, sehingga keberkahan pikiran, kesehatan, dan waktu yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Anomali Implementasi Otonomi Desa, Studi Kasus Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang”**.

Skripsi ini merupakan sebuah karya akademik yang dengan sengaja dibuat oleh penulis untuk menyempurnakan proses menuntut ilmu dalam program studi strata satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Tanpa bimbingan serta dukungan dari beberapa pihak, tidak akan menjadikan karya ilmiah ini berarti apa-apa dalam penyelesaian studi. Sehingga penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian studi:

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang menjadi satu-satunya motivasi terbesar saya untuk menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya. Tak lupa juga segenap keluarga besar yang selalu mensupport lahir dan batin.
2. Para Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Politik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Amin Heri Susanto, Lc., M.A., selaku pembimbing pertama yang sabar dan tegas dalam membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini serta Bapak Habibi Subandi, S.Sos., M.A., yang juga memberikan banyak bimbingan dan arahan.
4. Keluarga besar HMI KISIP Brawijaya yang menjadi belantara ilmu dalam berikhtiar mencari Ridho Allah SWT.

Semoga penelitian yang telah ditulis ini dapat memberikan banyak manfaat bagi siapapun yang membacanya, serta dapat memberikan kisanah baru dalam kajian Ilmu Politik di FISIP Universitas Brawijaya, khususnya bagi Program Studi Ilmu Politik. Meskipun begitu, penulis menyadari karya ilmiah ini masih perlu dikembangkan dan disempurnakan lagi.

Malang, 23 April 2018

Nabila Rahma Nugraheni

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRACT.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teoritis.....	10
2.1.1 Teori Powercube.....	10
2.2 Tinjauan Konseptual.....	15
2.2.1 Desa.....	15
2.2.2 Kearifan Lokal.....	18
2.2.3 Kekuasaan.....	19
2.2.4 Otonomi Daerah.....	23
2.2.5 Otonomi Desa.....	27
2.3 Penelitian Terdahulu.....	30
2.4 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	37
BAB III: METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4.1 Studi Kepustakaan.....	40
3.4.2 Wawancara.....	41
3.4.3 Observasi.....	41
3.4.4 Dokumentasi.....	42
3.5 Teknik Analisis Data.....	43
3.6 Validitas Data.....	45

BAB IV: PROFIL DESA PURWOREJO NGANTANG.....	46
4.1 Profil Desa.....	46
4.1.1 Sejarah.....	46
4.1.2 Demografi.....	47
4.1.3 Geografis.....	48
4.1.4 Sumber Daya Manusia.....	49
4.1.5 Sosial Politik.....	51
4.1.6 Ekonomi.....	52
4.2 Kondisi Pemerintahan Desa Purworejo.....	53
4.2.1 Pembagian Wilayah.....	53
4.2.2 Struktur Organisasi.....	53
4.3 Visi dan Misi Desa Purworejo.....	55
4.3.1 Visi.....	55
4.3.2 Misi.....	56
4.4 Keuangan Desa.....	58
BAB V: ANALISIS ANOMALI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA PURWOREJO NGANTANG.....	60
5.1 Dimensi Implementasi Otonomi Desa Tinjauan <i>Powercube Theory</i>	60
5.1.1 Dimensi <i>Level</i>	64
5.1.2 Dimensi <i>Space</i>	70
5.2 Bentuk Anomali Implementasi Otonomi Desa Purworejo.....	72
5.2.1 Distruksi Sistem Budaya Pedesaan.....	74
5.2.1.(a) Distruksi Sistem Budaya Politik (<i>Distruction Political Culture</i>).....	77
5.2.2.(b) Transformasi Budaya Politik (<i>Transformatioan Political Culture</i>).....	80
5.2.2 Disintegrasi Antar Lembaga Pemerintah Desa dengan Lembaga <i>Supra Village</i>	81
5.2.2.(a) Disintegrasi antara Pemerintah Desa dengan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian.....	82
5.2.2.(b) Disintegrasi Pemerintah Desa, Lembaga <i>Supra Village</i> Desa, dan CSR.....	84
5.3 <i>Interest Group Supra Village</i> di Desa Purworejo.....	85
5.3.1 Kepentingan BULOG.....	86
5.3.2 Kepentingan PT.Gudang Garam.....	88
5.4 Dampak Anomali Implementasi Otonomi Desa.....	90

5.4.1 Apatisme Politik.....	90
5.4.2 <i>Inaccurate Policy</i>	92
5.4.3 Stagnasi Ekonomi Pedesaan.....	93
BAB VI: PENUTUP.....	94
6.1. Kesimpulan.....	94
6.2. Rekomendasi.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	102



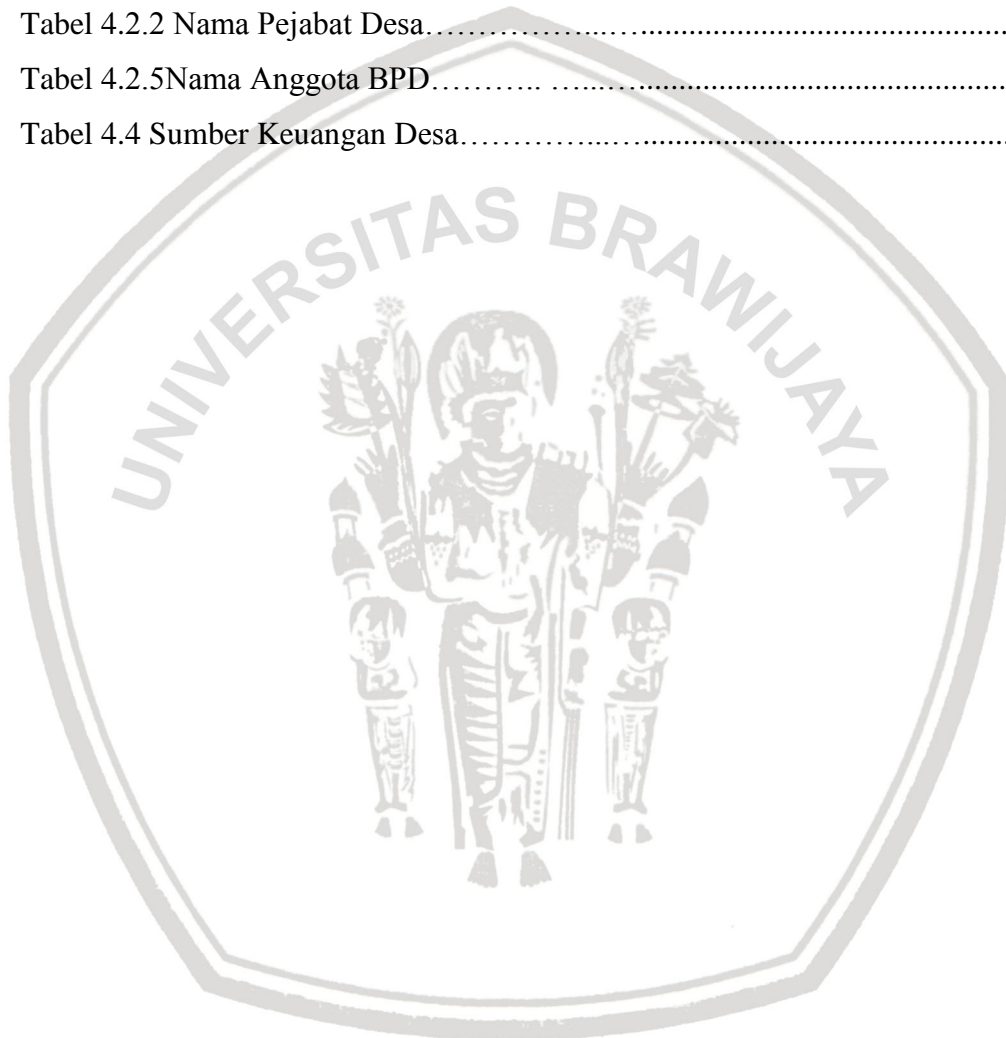
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema <i>Powercube</i>	11
Gambar 2.2 Bagan Pemerintahan Sentralistik dan Desentralistik.....	27
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian.....	43



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	43
Tabel 4.1.4 Tamatan Sekolah Masyarakat.....	46
Tabel 4.1.4 Mata Pencaharian Penduduk.....	49
Tabel 4.2.2 Nama Pejabat Desa.....	51
Tabel 4.2.5 Nama Anggota BPD.....	42
Tabel 4.4 Sumber Keuangan Desa.....	55



DAFTAR SINGKATAN

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPTP	: Balai Pengkajian Teknologi Pertanian
BULOG	: Badan Urusan Logistik
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
HIPPA	: Himpunan Petani Pemakai Air
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
IDS	: <i>Institute Development of Study</i>
Kamituwo	: Orang yang tugasnya membantu kepala desa di dusun
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
Kebayan	: Orang yang mengurus segala administrasi desa
Kepetengan	: Orang yang mengurus keamanan dan ketertiban
Kuwowo	: Orang yang bertugas mengurus pembangunan.
KK	: Kepala Rumah Tangga
Modin	: Orang yang mengurus tentang agama
PPL	: Penyuluh Pertanian Lapangan
PT	: Perseroan Terbatas
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
VOC	: <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

ABSTRAK

Nabila Rahma Nugraheni, Program Sarjana, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya Malang, 2017. Anomali Implementasi Otonomi Desa Studi Kasus Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang. Tim Pembimbing: Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D dan Habibi Subandi, S.Sos., M.A.

Penelitian bertemakan politik pedesaan ini mengidentifikasi bagaimana bentuk anomali dalam implementasi otonomi desa serta bagaimana dampaknya dalam masyarakat di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang. Aktor-aktor yang terlibat antara lain perangkat desa, aktor *supra village*, serta masyarakat Desa Purworejo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dari wawancara yang didasarkan pada literasi terdahulu dan data-data sekunder.

Anomali dalam implementasi otonomi desa berdasarkan *Powercube Theory* dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara implementasi Undang-Undang Desa dengan kondisi kearifan lokal yang ada pada masyarakat Desa Purworejo. Sehingga memunculkan dampak antara lain apatisme politik masyarakat desa, inakurasi kebijakan, serta stagnasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Purworejo. Sebagai wujud penanganan masalah tersebut, undang-undang desa seharusnya diejawantahkan sesuai dengan kondisi sosiokultur masyarakat desa terkait, kemudian dibutuhkan upaya koordinasi yang terintegrasi dari pusat hingga ke desa, dan selalu mengingatkan pihak pemerintah desa untuk mengeluarkan produk hukum dalam setiap putusan dan wewenangnya agar memiliki legitimasi yang kuat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran tentang bentuk-bentuk anomali dalam implementasi otonomi desa disebabkan oleh tidak sesuai tatanan kebijakan dari pusat dengan kondisi kearifan lokal masyarakat desa sehingga memunculkan beberapa masalah krusial antara lain; distruksi sistem budaya atau kearifan lokal desa, disintegrasi antar lembaga desa dan *supra village*, serta adanya *interest group* yang menguntungkan maupun merugikan pihak desa.

Kata Kunci: Otonomi Desa, Kearifan Lokal, dan *Powercube Theory*

ABSTRACT

Nabila Rahma Nugraheni, Undergraduate Program, Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, Brawijaya University of Malang, 2017. Anomaly Implementation of Village Autonomy Case Study of Purworejo Ngantang Village, Malang Regency. Supervisor Team: Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D and Habibi Subandi, S.Sos., M.A.

This research aims to identify the anomaly in the implementation of village autonomy and how its impact to the peoples of Purworejo Village, Ngantang. I conduct interview to the village officials, supra village actors, and villagers. I use descriptive and qualitative analysis to the data acquired from interviewa and recorder data.

Based on the Powercube Theory, I analyze that there is incompatibility between the law of village government and localities which developed in the society. The impact of this incompatibility, leads to political apatism, inaccuracy of policy and stagnation of economic development the village. In my view the lawsof village government has to be adjusted to the locality and needs to do more integrated coordination from the upper government.

This result of this research we can analyze the shape of anomaly implementation of village autonomy that cause from laws from upper government does'nt based on locality of the village, thus the crucial issues appear like distruction of culture system and localities, disintegration between village government and supra village institution, and interest group.

Keywords: Village Autonomy, Local Rural Wisdom, and Powercube Theory





ANOMALI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA
Sebuah Studi di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nabila Rahma Nugraheni
NIM. 135120500111031

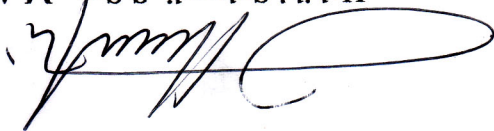
Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Pertama



Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D
NIP: 201607 750909 1001

Pembimbing Kedua



Habibi Subandi, S.Sos., M.A.
NIP: 201304 840905 1 001

ANOMALI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA

Sebuah Studi di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Nabila Rahma Nugraheni

NIM. 135120500111031

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam Ujian Komprehensif

pada tanggal 3 Mei 2018

Tim Penguji

Ketua Majelis Penguji



Amin Heri Susanto, Lc., MA., Ph.D.
NIP: 201607 750909 1001

Anggota Penguji II

Sekretaris Majelis Penguji
Habibi Subandi, S.Sos., M.A.
NIP: 201304 840905 1 001

Anggota Penguji I

Taufik Akbar, S.IP., M.IP
NIP: 201405 851101 1 001

Anggota Penguji II

Wimmy Halim, S.IP., M.Sos
NIP: 201607 900704 1 001

Malang, 3 Mei 2018

Mengctahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludiqdo, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19690814 199402 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi perlahan menemukan titik keseimbangannya setelah muncul sebuah wacana tentang otonomi desa.¹ Sejak 35 tahun lalu telah banyak peneliti yang intens membahas mengenai dinamika politik desa seperti halnya Priyono Tjiptpherijanto dan Yumiko M. Priyono yang meneliti secara komprehensif tentang dinamika politik desa di Jawa.² Berangsur-angsur hingga kini sudah banyak yang mencoba menjadikan desa sebagai objek penelitian, namun rata-rata dari rentang masa pasca orde baru hingga sekarang penelitian lebih banyak yang berfokus pada isu desentralisasi serta dinamika politik transaksional yang berpusat pada isu-isu pemilihan kepala daerah.³

Munculnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa menjadi angin segar bagi kajian pedesaan, karena memperluas khasanah dalam kajian pedesaan. Sebelum diterbitkannya UU tersebut, telah banyak undang-undang yang mengatur tentang eksistensi desa dan pemerintah daerah yaitu; masa orde lama

¹ Wasistiono Sadu (1993), *Pemilihan Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, Bandung: Mekar Rahayu, hlm, 87. (Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sejak masa reformasi praktik demokratisasi secara radikal berkembang pesat di Indonesia dan dimulai dari desa-desa. Pemilihan kepala desa merupakan sebuah bentuk konkrit dari demokratisasi. Artinya dengan munculnya wacana tentang otonomi desa mulai tahun 2004 mengartikan bahwa proses demokratisasi desa telah meningkat pesat)

² Yumiko M. Priyono dan Priyono Tjiptohieranton (2012), *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Kosakata Kita.

³ Mulai masa pasca reformasi, isu-isu yang ramai diangkat adalah mengenai desentralisasi pemerintahan. Hal tersebut merupakan dampak dari semangat reformasi yang sedang besar-besarnya setelah masa orde baru berakhir. Namun penulis menemukan hingga sekarang ini, penelitian-penelitian tentang pedesaan masih berputar pada isu-isu tersebut.

(UU Nomor. 22 Tahun 1948, UU Nomor.18 Tahun 1965, UU Nomor.19 Tahun 1965), masa orde baru (UU Nomor.5 Tahun 1975, UU Nomor.5 Tahun 1979, masa reformasi (UU Nomor.22 Tahun 1999, UU Nomor.32 Tahun 2004, UU Nomor.23 Tahun 2014).⁴ Dari sekian banyak undang-undang yang mengatur tentang desa tersebut, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan desa di seluruh Indonesia dalam hal hukum adat, keberagaman, demokratisasi, partisipasi masyarakat, serta pemerataan pembangunan.⁵ Sehingga Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 membawa sedikit angin segar bagi desa dan membawa *ghirah*⁶ baru yaitu “otonomi desa”.⁷

Berdasarkan undang-undang tersebut, desa dipandang sebagai sebuah entitas sosial politik yang perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, serta demokratis. Hal tersebut didasari oleh keberadaan desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.⁸ Di dalam undang-undang tersebut juga diatur sedemikian rupa tentang hubungan pemerintah desa dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola berbagai macam urusan-urusan pedesaan dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

⁴ Nyimas Latifah Letty Aziz (2016), Jurnal Penelitian Politik Volume.13 No.2, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*, Jakarta: LIPI, hlm,195.

⁵ *Ibid.*, Nyimas Latifah Letty Aziz (2016), *hlm*,196.

⁶ Dalam bahasa Indonesia bermakna semangat yang kuat.

⁷ Otonomi desa diartikan sebagai bentuk pemberian legitimasi untuk tingkat desa dalam hal menentukan dan memutuskan kebutuhan dan kepentingannya sendiri. Dalam hal ini konteksnya adalah wewenang desa untuk mengeluarkan produk hukum sesuai dalam Keputusan Mendagri Nomor.126 Tahun 2003 yaitu berupa peraturan desa, keputusan kepala desa, keputusan bersama, dan instruksi kepala desa.

⁸ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Seiring berjalannya waktu, lahirnya kembali otonomi desa memunculkan beraneka ragam dinamika sosial dan politik mulai dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi pada negara yang mengalami transisi sentralisasi menuju ke desentralisasi sistem pemeritahan. Apabila menelisik ke belakang, sistem politik pemerintahan Indonesia menempuh perjalanan panjang yang sentralistik pada masa Orde Baru. Dan ketika terjadi transisi dari sentralistik menuju desentralistik, pemerintah dan masyarakat membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk penyesuaian.

Apabila ditelisik lagi lebih ke belakang, dalam perjalanannya desa telah menjadi objek pembangunan yang diinisiasi oleh pemerintah pusat sejak sekian lama. Dimulai pada masa orde baru, Indonesia tidak hanya bergejolak dalam sistem politik melainkan juga pada konsep pembangunannya. Maka dari itu sulit rasanya untuk melepaskan simpul-simpul pola kewenangan dan kekuasaan yang telah melekat selama ini.

Pada kenyataannya sejak program-program pembangunan nasional digalakkan pada masa ini, desa hanya diposisikan tidak lebih sebagai sasaran-sasaran proyek-proyek yang dirumuskan pemerintah pusat.⁹ Desa tidak dipandang sebagai entitas yang hidup dan berdaya. Sebagaimana kita ketahui, pada kenyataannya desa adalah objek yang harus menerima kemajuan dari proses pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui program

⁹ Halim, Abdul (2014), *Politik Lokal, Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya*, Yogyakarta: LP2B. hlm,11.

pembangunan desa terpadu yang memiliki trilogi rumusan yaitu stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pelayanan sosial.

Program pembangunan nasional memang telah memberikan perubahan pada masyarakat secara tampak mata seperti pembangunan jalan dan berupa bantuan-bantuan tunai maupun sembako. Namun, dibalik kemajuan tersebut terdapat kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu yang menjadikan desa hanyalah sebagai objek dari kepentingan mereka yang mengarah pada neoliberal.¹⁰ Dari praktik politik pemerintahan desa di era otonomi desa saat ini, yang memiliki tujuan awal mencegah berlanjutnya pemerintahan yang sentralistik untuk mengelola aset daerah, namun dengan kaburnya porsi kewenangan serta kekuasaan pada era otonomi desa ini dapat menjadi celah masuknya kepentingan-kepentingan yang menguntungkan sekelompok orang ataupun individu.

Lalu apabila kembali pada pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa penulis ingin mengetahui sejauh mana UU tentang desa tersebut diimplementasikan, apakah sesuai dengan kondisi *grassroot* di pedesaan atau tidak. Jikalau sesuai dengan kondisi di *grassroot* maka seharusnya perubahan-perubahan yang konstruktif sudah banyak terjadi. Namun nyatanya penulis menemukan fakta bahwa selama diberlakukannya UU tentang desa tersebut tidak ada perubahan yang signifikan dalam tingkat kemiskinan di Kabupaten Malang. Berdasarkan asumsi dasar penulis, hal ini disebabkan oleh beberapa hal mulai dari banyaknya produk-produk hukum yang mengatur jalannya

¹⁰ Mansour Fakih (2004), "*Bebas dari Neoliberalisme*", Yogyakarta: INSIST Press, hlm, 57.

pemerintahan desa, hingga disintegrasi antar aturan-aturan dan implementasi kebijakan yang menimbulkan beberapa masalah di pedesaan.

Terbukti semenjak UU No.6 tahun 2014 diberlakukan dan digelontorkannya Dana Desa yang sangat besar angka kemiskinan di Kabupaten Malang yang notabene memiliki kekayaan alam yang melimpah justru terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2014 penduduk miskin mencapai 280.310 sedangkan di tahun 2015 menjadi 292.870 penduduk miskin. Artinya ada penambahan sebanyak 12.560 selama satu tahun.¹¹

Untuk mengkaji masalah ini lebih dalam, penulis mengambil studi kasus di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang, yang mana merupakan sebuah desa penghasil bawang merah dan menjadi salah satu sentra bawang merah terbesar di Indonesia setelah kota Probolinggo dan Nganjuk. Komoditas bawang merah paling banyak dihasilkan di Desa Purworejo untuk memenuhi permintaan dari berbagai daerah, rata-rata hasil produksi bawang merah di Desa Purworejo mencapai 3000 ton per bulan.¹² Namun setelah diimplementasikannya UU No.6 Tahun 2014 dan turunnya Dana Desa hingga kini, kesejahteraan masyarakat desa Purworejo Ngantang belum ada peningkatan yang signifikan namun di lapangan justru penulis menemukan keluhan penurunan kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh disintegrasi antar lembaga pemerintah desa dengan lembaga *supra village*

¹¹ Silahkan dilihat melalui <http://www.malangtimes.com/baca/16995/20170210/153231/setiaptahun-penduduk-miskin-kabupaten-malang-meningkat/> , diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 13.23 WIB.

¹² Silahkan dilihat melalui <http://ngantang.malangkab.go.id/?p=1412>, dalam “*Panen Raya Bawang Merah Desa Purworejo Kecamatan Ngantang*”, diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 08.10 WIB

yang berkepentingan di desa. Hal tersebut dikeluhkan oleh poktan di Desa Purworejo, masyarakat yang rata-rata sebagai petani yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak terkait yang berkepentingan.¹³

Selain permasalahan kesejahteraan masyarakat desa, tidak adanya sinkronisasi implementasi undang-undang secara *bottom up* memunculkan sebuah dinamika baru di pedesaan yang cukup rumit yaitu tentang pola-pola baru hubungan antara elit desa dengan masyarakat desa dan pola-pola baru hubungan elit desa dengan elit di luar desa (*supra village*). Sehingga memberikan dampak yang cukup besar terhadap implementasi otonomi desa itu sendiri. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya peraturan perundang-undangan yang kerap kali dirubah sebelum seluruh aktor memahami dan mengimplementasikan secara menyeluruh, menimbulkan distorsi pemahaman serta memunculkan perbedaan interpretasi di masyarakat desa, pemerintahan desa, maupun pemerintahan supra desa (*supra village*).¹⁴

Hal tersebut yang mendasari penulis bahwa kajian mengenai otonomi desa merupakan hal yang sangat penting dan menarik dalam kajian politik. Karena pedesaan merupakan lapisan masyarakat yang memiliki latar belakang sosial, budaya, dan politik, serta kearifan lokal yang lebih kompleks. Dalam pemerintahannya, sebagian besar masyarakat desa memiliki kearifan lokal tersendiri meskipun dalam kelembagaan telah mengikuti format pemerintahan

¹³ Diskusi santai bersama Ketua Poktan dan beberapa warga dan petani Desa Purworejo

¹⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

yang resmi.¹⁵ Dalam UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah komunitas yang mengatur dirinya sendiri sesuai dengan adat istiadat dan budaya yang diakui oleh Pemerintahan NKRI.¹⁶ Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik yang telah ada.

Dari panjangnya perjalanan kehidupan sosial dan politik pedesaan di Indonesia serta ketidakadilan dan ketimpangan pada sektor ekonomi di pedesaan, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang bagaimana implementasi otonomi desa di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang apakah sesuai dengan kondisi *grassroot* pedesaan. Dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Otonomi Desa (Studi Kasus Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang)” ini penulis fokus pada wilayah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan landasan, adanya sektor pemenuhan kebutuhan nasional di wilayah Ngantang. Dengan adanya sektor pemenuhan pangan nasional tersebut, kemungkinan besar terjadi gesekan-gesekan pada prinsip-prinsip desentralisasi otonomi desa. Indikasinya adalah terdapat aktor-aktor pemerintah mulai dari pusat sampai daerah hingga pihak swasta yang turut mengambil peran di dalamnya.

Hal ini menjadi lebih menarik lagi karena penulis hendak menganalisis bagaimana perilaku politik pada petani pedesaan di dataran tinggi. Karena selama ini, dari berbagai macam perlawanan-perlawanan petani, sebagian besar adalah

¹⁵ Silahkan dilihat melalui <http://www.spi.or.id/otonomi-desa-dan-ancaman-kapitalisme-global/> Dalam “*Otonomi Desa dan Ancaman Kapitalisme Global*”, diakses pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 20.21 WIB

¹⁶ UU Nomor 32 Tahun 2004. Tentang pemerintahan daerah.

petani yang berasal dari daerah dataran rendah. Padahal banyak sekali ketidakadilan dalam sistem politik dan ekonomi di pedesaan, namun jarang sekali dijumpai adanya gejala politik pada masyarakat pedesaan di dataran tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang sudah dijabarkan tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana anomali implementasi otonomi desa di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang bisa terjadi?
2. Siapa sajakah dan bagaimanakah pola aktor yang berkepentingan di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang?
3. Bagaimana dampak anomali implementasi otonomi desa pada masyarakat Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menemukan dan memahami bagaimana implementasi otonomi desa di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang.
2. Menganalisa siapa saja dan bagaimana pola aktor yang berkepentingan di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang.
3. Menganalisa bagaimana dampak anomali implementasi otonomi desa pada masyarakat Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Di dalam proses perumusan dan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya diharapkan dapat memberikan manfaat baru bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian. Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan wawasan baru bagi Kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya dalam bidang politik pedesaan khususnya mengenai praktik Otonomi Desa di sentra pangan nasional Kecamatan Ngantang.
2. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah desa tentang optimalisasi implementasi otonomi desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Untuk mengupas dan menganalisis sebuah penelitian, metode yang tepat memberikan pengaruh yang besar terhadap hasil penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang memiliki fungsi untuk menggambarkan dan menjabarkan permasalahan yang bersifat holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif Peneliti akan menjelaskan bagaimana implementasi otonomi desa di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang serta bagaimana teori *powercube John Gaventa* dapat menjelaskan kesesuaian implementasi otonomi desa dengan kondisi masyarakat di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bersifat naturalistik yang disebabkan karena penelitian dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*) yang memposisikan peneliti sebagai instrumen kunci karena hasil dari penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹ Melalui data dan informasi mengenai peran berbagai struktur pemerintahan dalam era otonomi desa, diharapkan dapat menjadi literasi baru dan dapat menjadi masukan untuk memperbaiki praktik otonomi desa.

¹Sugiyono (2010), “Memahami Penelitian Kualitatif”, Bandung: ALFABETA, hlm,2.

3.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian tentang Politik Pedesaan ini dilaksanakan di Kabupaten Malang, karena di penelitian yang menganalisis tumpang tindih kekuasaan dala era otonomi desa masih belum ada di Kabupaten Malang. Dan di Ngantang merupakan sentra pemenuhan kebutuhan pangan Nasional. Banyaknya aktor-aktor yang terjun di sana sehingga mendukung penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti bagaimana bentuk anomali implementasi otonomi desa di Desa Purworejo Ngantang yang notabene merupakan desa sentra bahan pangan nasional.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian untuk membatasi wilayah analisis penelitian. Hal ini berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, penulis berusaha membatasi masalah yang akan diteliti agar tetap pada jalur dan tidak keluar dari tujuan melakukan penelitian. Selain itu fokus penelitian juga ditujukan agar peneliti bisa lebih terarah atau sistematis dan terperinci, sehingga tidak menyimpang dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan pada penelitian ini. Agar hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Otonomi Desa di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang bisa terjadi?

- b. Siapa saja dan bagaimana pola aktor di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang?
- c. Bagaimana dampak anomali implementasi otonomi desa pada masyarakat Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang?

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Proses penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder yang keduanya akan dikolaborasikan sesuai kebutuhan penulis untuk mengkonstruksi analisa permasalahan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu, observasi partisipatif, wawancara, pengumpulan data, studi literatur terkait, studi dokumentasi, dan triangulasi data. Berikut cara penulis untuk melakukan pengumpulan data pada penyusunan penelitian ini :

3.4.(a) Studi Kepustakaan

Untuk melakukan sebuah penelitian yang kontekstual, studi literatur sangat diperlukan untuk membangun pengetahuan mendasar peneliti dalam mengkonstruksi fenomena-fenomena baru di masyarakat. Studi literatur berupa kajian teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan tema penelitian yang akan dilakukan penulis. Penulis menggunakan sejumlah literatur yang sesuai dan relevan dengan penelitian yang diangkat, literatur yang dipilih antara lain buku yang berjudul “Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Sejak Kemerdekaan hingga Reformasi” yang ditulis oleh Dr.Ni’matul Huda, SH., M.Hum, kemudian buku berjudul “Politik Lokal, Pola, Aktor, dan Dramatikanya” yang ditulis oleh

Dr.H.Abd.Halim, M.A, karena menurut penulis buku tersebut berkaitan dan sangat membantu penulis untuk memetakan dan menganalisis masalah praktik politik pedesaan di era otonomi desa. Selain itu penulis juga membedah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai alat bantu analisa masalah.

3.4.(b) Wawancara

Wawancara penulis gunakan sebagai teknik untuk mendapatkan data-data primer, yaitu dengan mewawancarai langsung responden yang dilakukan dengan *in-depth interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas dan mendalam dan lebih bebas dari wawancara yang tersruktur sehingga memungkinkan penulis menggali data lebih dalam dan variatif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan Teknik *Purposive*, dimana penulis menetapkan informan yang akan dipilih karena memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Responden yang terkait, dalam hal ini pejabat-pejabat desa di Kecamatan Ngantang, Camat Ngantang, Perwakilan Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian Kabupaten Malang, serta kelompok-kelompok masyarakat di Ngantang. Pihak-pihak yang akan dilakukan wawancara tersebut sebagai berikut:

1. Informan Kunci : Pak Siswaji Kepala Desa
2. Informan Pendukung : Ibu Winarni (Carik), Pak Sukowiyono (ketua Poktan)

3. Informan Tambahan : Ibu Baswarsiati (BPTP Kementrian Pertanian), masyarakat umum, Perwakilan BULOG, dan Perwakilan PT.Gudang Garam

3.4.(c) Observasi

Hasil penelitian yang empiris dan kontekstual tidak mungkin dilakukan tanpa mengadakan pengamatan langsung di lapangan. Maka sangat penting melakukan pengumpulan data dari proses observasi yang dilakukan sesuai pedoman penelitian. Pada tahapan pertama peneliti berusaha mendapatkan informasi atau data sebanyak-banyaknya dari literasi fisik maupun digital. Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengamatan, maka dapat menunjang pemahaman peneliti tentang kondisi lapangan serta mengungkapkan keadaan yang dijelaskan sesuai data yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan pengelolaan berjalannya otonomi desa di Ngantang Kabupaten Malang. Dengan melakukan observasi maka penulis berharap dapat menemukan data terkait Apakah banyaknya pihak yang turun dalam menangani permasalahan pedesaan tidak menghilangkan atau mengaburkan prinsip-prinsip implementasi otonomi desa.

3.4.(d) Dokumentasi

Melalui observasi penulis juga dapat memperoleh data sekunder dalam bentuk dokumentasi yang diperoleh dari aktor-aktor objek penelitian. Data sekunder tersebut tidak mentah mentah disertakan di dalam penulisan sebuah penelitian, melainkan harus melalui proses analisa dan pengkajian sesuai dengan kebutuhan penelitian. Studi tentang dokumentasi dilakukan untuk mempelajari aturan-aturan

tentang otonomi daerah, otonomi desa, serta praktiknya di pedesaan. Dokumen yang dipakai peneliti dapat dalam bentuk catatan dalam kertas (*hardcopy*), maupun elektronik (*softcopy*) peraturan perundang-undangan, jurnal, notulen, blog, halaman web dan foto serta pendapat para ahli² yang terkait dengan penelitian tentang politik pedesaan di Ngantang Kabupaten Malang.

3.5 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentang politik pedesaan di era otonomi desa akan diolah dan bisa diambil kesimpulan sementara serta akan dibandingkan dengan kondisi empiris praktik pemerintahan di desa-desa Kecamatan Ngantang. Untuk meningkatkan akurasi dari kesimpulan di akhir penelitian, maka penulis juga melakukan analisis data yang berasal dari desa-desa lain di Kecamatan Ngantang.

Dari permasalahan tersebut, maka akan ditemukan bagaimana pola releasi antara stuktur dalam eraotonomi desa. Adapun bila mengacu pada teknik analisis data maka dapat dilakukan dengan metode kondensasi data sebagai berikut:

a. Induksi Data

Induksi data merupakan proses yang tidak kalah penting untuk menyusun sebuah kesimpulan yang holistik. Prosesnya dimulai berdasarkan beberapa fakta dan data yang dijumpai di awal dan dikonfigurasi dengan runtut. Konfigurasi dari fakta dan data tersebut digunakan untuk mengkonstruksi sebuah hipotesis awal. Dalam penelitian ini penerapan

² Samiaji Sarosa (2012), *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Jakarta: PT Indeks, hlm. 61

pendekatan induksi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data terlebih dahulu dengan cara melakukan wawancara dengan pihak pemerintah desa tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi sejak otonomi desa dan pihak-pihak mana saja yang turun ikut serta.

b. Deduksi Data

Deduksi data adalah sebuah proses penarikan kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang diajukan berdasarkan hasil analisis data. Proses penarikan kesimpulan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang valid yang kemudian dilakukan tahapan pengujian hipotesis berdasarkan keadaan empiris di lapangan. Pendekatan deduksi ini diawali dengan hal-hal yang bersifat umum lalu menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

c. Komparasi Data

Komparasi data adalah teknik analisis data yang dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fakta-fakta atau bukti-bukti yang didapat di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti berusaha membandingkan data hasil wawancara yang didapat dari beberapa informan untuk kemudian dikomparasikan dengan teori dan konsep yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari sebuah penelitian mutlak dilakukan. Selama penelitian juga dilakukan agenda verifikasi data untuk meninjau kembali hasil penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bagaimana Bagaimana teori

Powercube John Gaventa dapat menjelaskan kesesuaian implementasi otonomi desa dengan kondisi masyarakat di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang.

3.6 Validitas Data

Dalam sebuah penelitian, terdapat metode yang dikenal dengan validitas data. Hal ini bertujuan untuk menentukan keabsahan data yang diperoleh, melalui teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber dan triangulasi teori.

Triangulasi sumber diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.³ Dengan melakukan triangulasi sumber data, penulis secara tidak langsung juga sedang menguji kredibilitas dari data tersebut. Kemudian menurut Sugiyono triangulasi dalam bentuk teknik juga diperlukan untuk mendapatkan kesimpulan dari data-data berbagai sumber untuk meningkatkan pemahaman peneliti tidak hanya terhadap fenomena namun juga terhadap apa yang telah ditemukan di lapangan.⁴ Dengan menggunakan triangulasi maka akan lebih meningkatkan kekuatan data bila dibandingkan dengan pendekatan lainnya.

³ Samiaji Sarosa (2012), *Ibid.*, hlm,83

⁴ Samiaji Sarosa (2012), *Op.Cit.*, hlm,85

BAB IV

PROFIL DESA PURWOREJO NGANTANG

4.1 Profil Desa Purworejo

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang baik, maka diperlukan data-data primer yang menunjukkan garis besar kondisi desa. Data primer inilah yang dijadikan dasar dari penelitian mengenai anomali implementasi otonomi desa ini. Mulai dari sejarah terbentuknya desa hingga sistem pemerintah desa ditabulasi menjadi rujukan utama dalam penelitian.

4.1.1 Sejarah Desa

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari sesepuh desa bahwa Desa Purworejo didirikan oleh Punggawa Mataram yang melarikan diri akibat runtuhnya kerajaan Mataram. Orang yang datang ke Purworejo antara lain; 1) Ki Ageng Slamet/ Ki Ageng Poncoyudo/ Ki Ageng Gambulan, 2) Ki Ageng Noyo, 3) Ki Poncosumo, 4) Nyai Ranti. Keempat orang tersebut merupakan cikal bakal/ oleh masyarakat desa disebut dengan *Bedah Kerawang* Desa Purworejo. Pada awalnya, Desa Purworejo merupakan hutan belantara sebelum ke empat sesepuh tersebut *mbabat alas* dan mulai membangun permukiman. Seiring berjalannya waktu sebelum adanya perintah Penjajah Belanda untuk menggabungkannya menjadi satu pada tahun 1935, Desa Purworejo pada mulanya terbentuk dari desa-desa, antara lain; 1) Desa Pakan, 2) Desa Binangsri, 3) Desa Jeruk, 4) Desa Tokol. Yang saat ini menjadi dusun-dusun di Desa Purworejo.

Sejak tahun 1922 Desa Purworejo telah memiliki kepala desa yang dipilih langsung oleh masyarakat setempat. Adapun Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Purworejo antara lain; 1) Bapak Garbun (1922), 2) Bapak Supangkat (1935), 3) Bapak Martoredjo (1958-1968), 4) Bapak Djafar Soeyanto (1970-1988), 5) Bapak M. Harminto (1989-2007), 6) Bapak Yulianto (2007-2013), 7) Bapak Siswaji (2013-2019).

4.1.2 Demografi Desa

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa tahun 2016 jumlah penduduk Desa Purworejo terdiri dari 1194 kepala keluarga, dengan total jumlah warga 4.079 jiwa. Rincian demografi penduduk sesuai jenis kelamin dan usia adalah sebagai berikut:

Table 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

NO	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1	0 - 14	140	123	263	6,4
2	5 - 9	176	174	350	8,6
3	10 - 14	165	180	345	8,5
4	15 - 19	199	166	365	8,9
5	20 - 24	174	192	366	9,0
6	25 - 29	192	162	354	8,7
7	30 - 34	124	144	268	6,6
8	35 - 39	124	153	277	6,8
9	40 - 44	176	173	349	8,6
10	45 - 49	169	173	342	8,2
11	50 - 54	155	125	280	6,9
12	55 - 58	95	75	170	4,2
13	>59	169	181	350	8,5
Jumlah		2.057	2.022	4.079	100%

Sumber : diolah oleh penulis (2017)

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 20-49 tahun Desa Purworejo sekitar 1.956 jiwa atau hampir 46%. Hal tersebut merupakan sebuah gambaran bahwa tenaga produktif dan SDM yang produktif masih tergolong cukup. Namun untuk tingkat kemiskinan di Desa Purworejo tergolong tinggi. Dari 1.194 KK, sejumlah 409 KK tercatat sebagai Pra sejahtera; 201 KK tercatat keluarga sejahtera I; 450 KK tercatat keluarga sejahtera II; 229 KK tercatat keluarga sejahtera III, dan 5 KK tercatat sejahtera III plus. Apabila KK golongan pra sejahtera dan KK golongan sejahtera I digolongkan sebagai KK golongan miskin, maka lebih dari 50% KK di Desa Purworejo adalah keluarga miskin.

4.1.3 Geografis Desa

Secara geografis Desa Purworejo terletak pada posisi 7°21'-7°31' lintang selatan dan 110°10'-111°40' bujur timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa lereng gunung dan perbukitan dengan ketinggian sekitar 600m di atas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Malang tahun 2016, dari tahun 2004 curah hujan di Desa Purworejo rata-rata mencapai 3.000 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2000-2008. Dengan curah hujan yang cukup tinggi tanah di Desa Purworejo memiliki kesuburan yang bagus dan cocok untuk ditanami banyak jenis tanaman perkebunan.

Secara administratif, Desa Purworejo terletak di wilayah Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa

tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Mulyorejo, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjarejo, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Banjarejo, dan di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bendosari Kecamatan Pujon. Jarak tempuh Desa Purworejo ke ibu kota kecamatan adalah 8km yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 45km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 1,5 jam. Kondisi jalan sudah bagus dan tidak ada medan-medan yang curam serta membahayakan.

4.1.4 Sumber Daya Manusia

Taraf pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam memajukan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang akan memberikan pengaruh yang luas dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di sebuah desa. Dengan Banyaknya masyarakat desa yang mengenyam tingkat pendidikan, paling tidak dapat membaca dan menulis dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kualitas ekonomi masyarakat desa. Sehingga korelasinya adalah, semakin banyak masyarakat desa yang mengenyam pendidikan diharapkan semakin mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Adapun proses tase tingkat pendidikan di Desa Purworejo dapat dilihat pada table di bawah ini:

Table 2 Tamatan sekolah masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1	Buta huruf 10 tahun ke atas	134	3,2
2	Usia Pra-sekolah	462	10,9

3	Tidak Tamat SD	382	9,0
4	Tamat SD	2041	52
5	Tamat SMP	688	16,2
6	Tamat SMA	332	7,8
7	Tamat Perguruan tinggi/akademi	40	0,9
Jumlah		4.079	100%

Sumber: Diolah penulis (2017)

Berdasarkan data pada tabel di atas, mayoritas penduduk Desa Purworejo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar 9 tahun saja (SD dan SMP). Untuk ketersediaan SDM yang dibutuhkan dalam persaingan kerja di perkotaan jumlah tersebut sangatlah minim dan menjadi kendala tersendiri. Sehingga hal ini sangat mempengaruhi bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat desa berjalan. Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Purworejo tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada. Di samping itu permasalahan ekonomi juga menjadi kendala yang cukup besar. Hal yang paling mendasar lagi adalah, pandangan masyarakat desa tentang pendidikan juga masih sangatlah dangkal, sehingga orang tua lebih memilih untuk menyuruh anaknya mencari kerja daripada meneruskan sekolah ke tingkat menengah yang notabene letak sekolahnya relatif jauh.

Sebenarnya ada sebagian kecil masyarakat yang memikirkan bagaimana menangani kondisi tersebut, seperti halnya dengan melalui pelatihan dan kursus. Namun sarana atau lembaga yang menangani hal itu belumlah tersedia

dengan baik. Bahkan beberapa lembaga bimbingan belajar non formal dan pelatihan juga sempat ada namun sulit sekali berkembang.

4.1.5 Sosial Politik Desa Purworejo

Desa Purworejo memiliki keadaan sosial yang cukup dinamis, mulai dari kehidupan sosial yang kental akan budaya Jawa daerah dataran tinggi hingga kehidupan politik praktisnya. Harus diakui bahwa tradisi para leluhur masih sangat melekat dalam benak setiap warga desa. Tradisi-tradisi lokal yang syarat akan nilai budaya masih dilakukan hingga sekarang, seperti halnya *nyadran*, *slametan*, *tahlilan*, *mithoni*, dan lain sebagainya yang merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa. Sosial budaya tersebut pada akhirnya juga sangat mempengaruhi dalam konteks politik lokal Desa Purworejo, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pileg, pilpres, pemilu kota, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Purworejo, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidatnya) adalah mereka yang secara tradisional memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* dalam tradisi Jawa bagi keluarga tersebut.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta merta dapat diwariskan kepada anak-cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja,

kejujuran, dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis jika melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa digantikan jika ia berhalangan tetap.

4.1.6 Ekonomi Desa Purworejo

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Purworejo Rp750.000,00 tiap bulannya. Secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Purworejo dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industri, dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada masyarakat yang bekerja di sektor pertanian sejumlah 1.900 orang, terdiri dari petani sejumlah 404 orang dan buruh tani sejumlah 1.496 orang. Yang bekerja sebagai karyawan swasta 245 orang, yang berwiraswasta 29 orang, bekerja di sektor-sektor lain 52 orang, serta yang bekerja di bagian pemerintahan desa sebanyak 12 orang. Dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai mata pencaharian berjumlah 2.433 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian :

Table 3 Mata Pencaharian dan Jumlahnya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.900	78%
2	Jasa/perdagangan		
	1. Jasa pemerintahan	13	0,5%
	2. Jasa perdagangan	85	3%
	3. Jasa angkutan	12	0,4%
	4. Jasa keterampilan	0	0
	5. Jasa lainnya	410	16%
3	Sektor industri	2	0,08%
4	Sektor lain	11	0,4%
Jumlah		2.433	100%

Sumber: Diolah Penulis (2017)

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di Desa Purworejo masih cukup tinggi. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 10-55 yang belum bekerja 115 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 2.291 orang. Angka tersebut merupakan kisaran angka pengangguran di Desa Purworejo.

4.2 Kondisi Pemerintahan Desa Purworejo

Untuk menganalisis lebih mendalam tentang studi kasus di Desa Purworejo dibutuhkan informasi-informasi dasar tentang Desa Purworejo sebagai berikut:

4.2.1 Pembagian Wilayah Desa

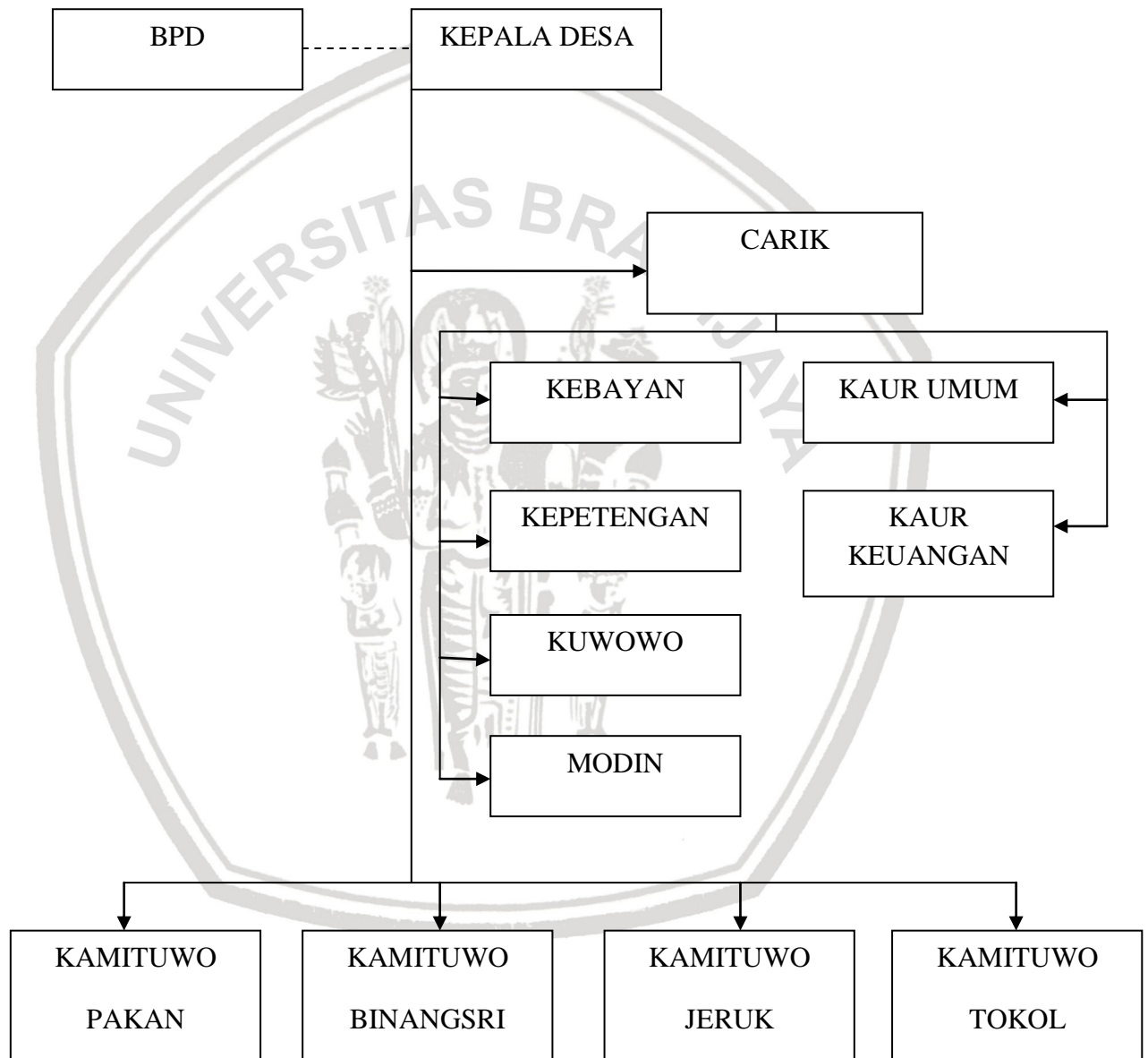
Wilayah Desa Purworejo terdiri dari 4 dusun yaitu; Dusun Pakan, Dusun Binangsri, Dusun Jeruk, dan Dusun Tokol, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun. Posisi Kepala Dusun menjadi sangat strategis sering banyaknya limpahan tugas desa kepada aparat desa tersebut. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di Desa Purworejo, dari keempat dusun tersebut dibagi menjadi 4 Rukun Warga (RW), dan 23 Rukun Tetangga (RT).

4.2.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Keberadaan RT sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan Desa Purworejo memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level atasnya. Sebagai sebuah desa sudah tentu struktur pemerintahan Desa Purworejo tidak bisa lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level atasnya.

Berikut adalah bagan dari struktur Pemerintahan Desa Purworejo:

Gambar 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Purworejo



GARIS KOMANDO : ----- GARIS KOORDINASI : _____

Table 4 Nama Pejabat Pemerintahan Desa Purworejo

No.	Nama	Jabatan
1	SISWAJI	KEPALA DESA
2	WINARNI	CARIK
3	ISWANDI	KAUR UMUM
4	SUYANTO	KAUR KEUANGAN
5	HERY PRAYITNO	KEBAYAN
6	PAIDI	KEPETENGAN
7	SLAMET MUJIONO	KUWOWO
8	SULIONO	MODIN
9	PURNOMO	KAMITUWO PAKAN
10	SAID	KAMITUWO BINANGSRI
11	SLAMET SUBADI, SH	KAMITUWO JERUK
12	SUKIONO	KAMITUWO TOKOL

Table 5 Nama Badan Permusyawaratan Desa Purworejo

No.	Nama	Jabatan
1	ASMARI	KETUA
2	SLAMET WIDODO	WAKIL KETUA
3	HILARIUS DAMINTO	ANGGOTA
4	SUKO WIYONO	ANGGOTA
5	YULIANTO	ANGGOTA

4.3 Visi dan Misi Desa Purworejo

Agar kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa berjalan sesuai kondisi real desa maka harus berpacu pada visi dan misi desa sebagai berikut:

4.3.1 Visi

Visi desa merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh kesatuan masyarakat desa sebagai tujuan jangka panjang. Walaupun secara normatif visi desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Desa Purworejo melalui rangkainya panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Purworejo semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan

terlaksananya rangkaian kegiatan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2013-2019. Dalam momentum inilah visi Desa Purworejo yang merupakan harapan dan doa semakin mendekatkan kenyataan yang ada dengan masyarakat desa. Kenyataan yang dimaksud adalah potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya saat ini maupun ke depan.

Adapun visi dari Desa Purworejo adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Purworejo yang berdaya saing dalam peningkatan sumber daya manusia serta terdepan dalam bidang pertanian.”

Keberadaan visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Purworejo. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Purworejo yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Disamping itu juga agar dapat mengembangkan inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanta pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan.

4.3.2 Misi Desa Purworejo

Hakekat misi Desa Purworejo merupakan turunan dari visi Desa Purworejo. Bagi masyarakat desa, misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dan akan menunjang keberhasilan dari tercapainya visi desa. Dengan kata lain misi Desa Purworejo merupakan penjabaran lebih operatif dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan situasu dan kondisi lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai sebuah visi.

Untuk mewujudkan visi Desa Purworejo seperti yang sudah dijabarkan di atas, maka dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal masyarakat desa menyusun misi-misi sebagai berikut:

- a. Mewujudkan dan mengembangkan terjadinya kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan internal warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lain-lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- c. Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah/jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.
- d. Menata pemerintahan Desa Purworejo yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius
- f. Mencari dan menambah debit air untuk mencukupi kebutuhan pertanian.
- g. Menumbuh kembangkan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani serta bekerja sama dengan HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan petani.
- h. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah
- i. Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melestarikan lingkungan hidup.
- j. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal agar mudah diakses dan dinikmati seluruh masyarakat

tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif, dan entrepreneur.

4.4 Keuangan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, hibah, sumbangan pihak ketiga dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Adapun pendapatan Desa Purworejo tahun anggaran 2017 sebesar Rp1.191.903.971 (satu milyar seratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh satu rupiah) yang berasal dari

Table 6 Sumber Keuangan Desa Purworejo tahun 2017

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 16.000.000
2	Dana Desa bersumber APBN	Rp. 653.673.000
3	Bagi hasil pajak daerah	Rp. 19.079.097
4	Bagi hasil retribusi daerah	Rp. 4.343.874
5	ADD	Rp. 487.808.000
6	Bantuan keuangan	0
	a. Dari pemerintah	0
	b. Dari pemerintah Provinsi	0
	c. Dari pemerintah kabupaten	0
7	Hibah dan sumbangan pihak ketiga	0

8	Lain-lain pendapatan desa yang sah	Rp. 11.000.000
Jumlah		Rp. 1.191.903.971

Sumber: (diolah penulis 2017)



BAB V

ANALISIS ANOMALI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA

5.1 Dimensi Implementasi Otonomi Desa dalam Tinjauan *Powercube Theory*

Otonomi desa selain sebagai wujud demokratisasi pada tingkat desa juga merupakan sebuah tatanan yang mencerminkan pola-pola hubungan kekuasaan yang berlaku dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan desa yang menjadikan desa sebagai subjek.¹ Hal ini didasarkan pada kedudukan otonomi desa dengan otonomi daerah sangatlah berbeda, karena otonomi desa telah ada jauh sebelum otonomi daerah. Hal ini dapat lebih lanjut dipahami melalui gagasan dari Soetardjo Kartohadikoesoemo² Sesuai dengan tujuan awalnya, otonomi desa diagendakan dalam rangka menjadikan desa sebagai entitas yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Hal tersebut apabila dipandang dari permukaan merupakan agenda baik yang sudah selayaknya dilakukan untuk memperbaiki pertumbuhan dan perkembangan desa-desa di seluruh Indonesia.³

Dalam perjalanannya otonomi desa digadang-gadang sebagai sebuah perkembangan sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Dengan prinsip mengembalikan kedudukan desa serta memperbesar partisipasi masyarakat desa dalam setiap aktivitas sosial, ekonomi, dan politik. Namun sebagai negara yang

¹ Edward Aspinall, Mada Sukmajati, (2015), *Politik Uang di Indonesia: Patr Nase dan Klientilisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta: PolGov, hlm,380.

² Dalam hemat Soetardjo, desa merupakan daerah otonom yang paling tua. Desa lahir jauh sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar bahkan sebelum lahirnya negara-negara (kerajaan)

³ Welhelmina Selfina Beli, (2016), Jurnal of Government – Jog Volume.2 Nomor.1, *Hidden Power dalam Pemekaran di Nusa Tenggara Timur*, hlm,12.

memiliki dinamika sistem sosial politik yang kompleks di dalam maupun pengaruh dari luarnya, pengimplementasian otonomi desa di Indonesia sudah seharusnya tidak hanya dilihat dari satu dimensi saja, melainkan harus dari berbagai dimensi dan sudut pandang.⁴ Terlebih lagi Desa Purworejo merupakan sebuah desa dengan budaya Jawa yang cukup kental menambah kompleksitas praktik demokratisasi yang diwujudkan melalui implementasi otonomi desa. Sebagaimana dalam KBBI kata otonomi artinya adalah hak dan kewajiban suatu daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, maka otonomi desa dalam praktiknya di Desa Purworejo harus pula mengacu pada latar belakang budaya yang telah lama diejawantahkan oleh masyarakat desa sebagai kearifan lokal.

Dengan kompleksitas kondisi pedesaan, maka pisau analisis yang sederhana belum tentu mampu mengungkap fenomena-fenomena dalam implementasi otonomi desa. Teori *Powercube* merupakan sebuah teori yang menawarkan sebuah cara pandang baru yang memiliki kompleksitas pisau analisis untuk menangkap fenomena-fenomena yang sering kali luput dalam kajian politik formal, meskipun dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi yang dijumpai di lapangan. Melihat praktik kekuasaan sebagai produk demokrasi, teori *Powercube* menganalisis kekuasaan dalam tiga dimensi. Tiga dimensi tersebut antara lain adalah level, ruang, dan bentuk.

Untuk membedah implementasi otonomi desa dengan ketiga dimensi tersebut perlu menarik garis panjang praktik demokrasi di Indonesia khususnya di

⁴ Idris Thaha (2004), *Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Masjid dan Amien Rais*, Jakarta: TERAJU, hlm, 29.

pedesaan. Telah banyak kajian dan penelitian mengenai desa namun hanya sebatas pada unsur-unsur formal dengan sudut pandang terbatas serta sempit. Sehingga kajian pedesaan seringkali cenderung dangkal formal dan tidak mengungkap fenomena secara menyeluruh. Sejak era bergantinya orde baru ke reformasi yang juga dibarengi dengan semakin terbukanya praktik demokrasi, bukan menjadi sebuah jawaban dalam merubah kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat pedesaan. Sehingga untuk saat ini praktik demokrasi dan kekuasaan di pedesaan khususnya Desa Purworejo tidak cukup hanya dianalisis dengan satu dimensi atau dua dimensi saja.

Maksudnya adalah praktik demokrasi dan kekuasaan di Desa Purworejo tidak cukup hanya dianalisis pada aspek *decision making* dan di luar *decision making*. Melainkan bagi John Gaventa ada hal di luar itu semua dan saling berkaitan satu sama lain yang membentuk dan melatarbelakangi sebuah sistem kekuasaan.⁵ Dalam pandangan teori *Powercube*, dengan menganalisis berbagai dimensi akan membukakan jalan untuk mengeksplorasi beragam aspek kekuasaan dan bagaimana interaksi antar aspek-aspek tersebut dengan cara memetakan para aktor, persoalan dan situasi yang melatarbelakangi, serta memungkinkan kita untuk melakukan perubahan secara tepat.

Dalam hal ini pada kacamata teori *Powercube* fenomena anomali sistem kekuasaan dalam otonomi desa dapat ditelisik tidak hanya dalam satu dimensi atau dua dimensi melainkan tiga dimensi antara lain sebagai berikut:

⁵Abd Halim (2014), *Loc., cit.*, , hlm,38.

5.1.1 Praktik Dimensi Kekuasaan *Level*

Salah satu dimensi dari tinjauan *Powercube Theory* adalah dimensi level (dimensi tingkatan). Dimensi level memandang bahwa spektrum kekuasaan yang diwujudkan dalam praktik demokrasi bukanlah sesuatu yang statis melainkan dinamis. *Powercube* menggolongkan level kekuasaan menjadi tiga skup yaitu global, nasional, dan lokal.⁶ Pada praktik kekuasaan di Pedesaan Indonesia memang tidak bisa dipisahkan dengan agenda politik global, dan nasional, ada interrelasi antara ketiganya.

Level global sudah tidak perlu ditanyakan lagi eksistensinya, arus globalisasi telah menghilangkan batas ruang dan waktu dalam bentuk apapun telah meresap ke seluruh penjuru dunia.⁷ Ditambah dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang menambah “tangan-tangan berkuasa” tanpa celah meresap di dalam kehidupan seluruh umat manusia yang tersentuhnya. Pedesaan tidak lagi asing bagi globalisasi, karena pedesaan merupakan sasarannya. Hal tersebut disebabkan karena adanya pergeseran pola industri dari awal masa industrialisasi yang menjadikan negara dunia ketiga menjadi objek.⁸ Perusahaan-perusahaan besar memilih negara dunia ketiga dikarenakan sebagai usaha efisiensi biaya produksi dengan logika semakin dekat dengan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya sehingga mengurangi ongkos produksi.

⁶ Abdul Halim (2006), *Op. Cit.*, , hlm,80.

⁷ Muhadi Sugiono (2005), *Globalisasi, Global Governance, serta Prospek Governance di Dunia ke Tiga* dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 8 Nomor 3, hlm,252.

⁸ Paulus Rudolf Yuniarto (2014), Jurnal Kajian Wilayah Vol.5 No.1 “*Masalah Globalisasi di Indonesia: Atara Kepentingan, Kebijakan, dan Tantangan,*” Jakarta: LIPI

Di Desa Purworejo globalisasi telah menyentuh berbagai macam aspek mulai dari teknologi (handphone, televisi, kendaraan bermotor), budaya, sampai pada pola-pola kehidupan pertaniannya. Maka secara tidak langsung globalisasi perlahan turut merubah pola-pola kehidupan sosial, ekonomi, hingga politik di Desa Purworejo. Namun masyarakat desa belum memiliki kesadaran aktif dalam menyikapinya.⁹ Dampak globalisasi paling besar dapat dirasakan pada aspek ekonomi desa yang mana sebagian besar bergantung pada lahan-lahan pertanian sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Mulai dari sistem kepemilikan tanah sampai pada hal teknis seperti pengelolaan lahan pertanian telah dipengaruhi oleh arus globalisasi. Hal yang paling menonjol adalah mengenai kepemilikan tanah di desa.

*“masyarakat di sini sekarang sudah banyak yang punya HP sama televisi Mbak, semenjak itu gaya hidup di sini agak berubah. Tiba-tiba banyak yang menjual tanahnya, alasannya buat beli motor, buat biaya pernikahan anaknya, buat modal kerja di luar desa, dan lain-lain. Malah sekarang jadinya ya mburuh aja Mbak di tanah orang.”*Jelas Pak Siswaji selaku Kepala Desa Desa Purworejo Ngantang.¹⁰

Dari gambaran tersebut arus globalisasi menjadi pintu perubahan pola cara hidup masyarakat Desa Purworejo, dan perubahan tersebut memberikan dampak yang sangat besar pada pola sosial ekonomi masyarakat Desa Purworejo. Munculnya polarisasi dalam kepemilikan tanah yang diakibatkan dari pola sosial ekonomi baru tersebut menjadi masalah yang serius. Akibatnya masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya pada pemilik tanah (pemilik tanah banyak yang

⁹Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherianto (2012), *Op., Cit.*, hlm, 88.

¹⁰Wawancara dengan Kepala Desa Purworejo pada tanggal, 25 September 2017, tentang pergeseran budaya masyarakat.

berasal dari luar desa) bekerja hanya sebagai buruh tani, dan sebagian lagi memilih mencari pekerjaan di luar desa yang rata-rata sebagai tukang, buruh pabrik, dan montir. Perbandingan penduduk yang memiliki tanah dan yang tidak dapat dilihat dalam table di bawah ini:

Table 1 Tabel Kepemilikan Tanah Desa Purworejo Tahun 2017

ASET TANAH MASYARAKAT DESA	Jumlah (Orang)
1. Tidak memiliki tanah	3838
2. Memiliki tanah antara 0,10-0,2ha	62
3. Memiliki tanah antara 0,21-0,3ha	58
4. Memiliki tanah antara 0,31-0,4ha	54
5. Memiliki tanah antara 0,41-0,5ha	48
6. Memiliki tanah antara 0,51-0,6ha	41
7. Memiliki tanah antara 0,61-0,7ha	25
8. Memiliki tanah antara 0,71-0,8ha	42
9. Memiliki tanah antara 0,81-0,9ha	38
10. Memiliki tanah antara 0,91-1,0ha	34
Total	402

Sumber: diolah penulis (2017)

Berdasarkan data di atas angka kepemilikan tanah di Desa Purworejo tergolong rendah dibandingkan yang tidak memiliki tanah. Padahal sebagian besar masyarakat desa bergantung pada sektor pertanian, dan tanah merupakan sumber penghidupan utama. Dan ketika masyarakat desa tidak memiliki tanah, sulit sekali untuk menaikkan kualitas ekonominya karena akses terbesar yang dimiliki hanyalah sektor pertanian. Sebagaimana dilaporkan oleh William Collier dan Soentoro¹¹ mengenai bahaya dari kepemilikan tanah di desa lebih banyak dikuasai oleh orang luar desa maka masyarakat desa akan kehilangan pengawasan atas tanah. Implikasinya adalah dasar dari demokrasi pedesaan tentang penguasaan

¹¹William Collier dan Soentoro (1995), "Rural Development and the Decline of Traditional Villages Welfare Institution in Java", Journal of Contemporary Asia Vol.5 No.3, hlm, 328.

komunal sumber-sumber desa sudah tidak ada lagi. Hal tersebut memicu lunturnya budaya-budaya komunal yang telah lama menjadi identitas pedesaan di Purworejo.¹²

Dengan masuknya produk-produk global seperti HP dan televisi memang tak sepenuhnya merupakan hal buruk, namun dampak yang diakibatkan di Desa Purworejo menjadi gambaran bahwa globalisasi bukanlah jalan yang harus diterima mentah-mentah oleh masyarakat Desa Purworejo. Seperti yang dikatakan oleh Yasraf Amir Piliang dalam bukunya *Dunia yang Dilipat*, bahwa melalui produk-produk globalisasi tersebut masyarakat desa dipaksa untuk terpengaruh oleh pola kehidupan masyarakat global (*global society*) maupun budaya global (*global culture*). Mulai dari cara hidup, gaya hidup (*life style*), sampai pada pandangan hidup masyarakat pedesaan perlahan berubah, dan perubahan tersebut mengancam berbagai macam warisan adat, kebiasaan, nilai, identitas, dan simbol-simbol yang berasal dari budaya lokal.¹³

Tidak berhenti dalam kepemilikan tanah, globalisasi juga merambah pada penggunaan teknologi pertanian di Desa Purworejo. Hampir seluruh masyarakat Desa Purworejo berprofesi sebagai petani telah merasakan dampak dari pengaruh globalisasi, yaitu dalam beberapa aspek seperti informasi teknologi dalam pertanian, produk-produk yang mempercepat dan memperbanyak hasil panen, bibit unggul, dan cara-cara industri membudidayakan tanaman. Seperti halnya

¹² Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherianto (2012), *Loc., Cit*, hlm, 88.

¹³ Abdul Halim (2006), *Loc., cit*, hlm, 82.

dipaparkan oleh Bapak Sukowiyono selaku ketua Kelompok Tani (poktan) Karya Bakti Desa Purworejo:

*“sistem pertanian disini sudah lama berubah Mbak. Kalau orang tua kami dulu bertani itu urusan soal titen dan telaten. Tapi kalau sekarang ini kayaknya sudah sulit. Seingat saya mulai pas jamannya Pak Harto dulu, pernah kami disuruh menanam padi tok dan harus beli bibit yang bagus dari pemerintah, katanya biar cepet panen dan hasilnya banyak Mbak. Juga satu paket sama pupuk kimianya, memang hasilnya banter Mbak, panen lebih cepet hasilnya juga lebih banyak”.*wawancara bersama ketua poktan Karya Bakti Desa Purworejo.¹⁴

Dari wawancara tersebut Pak Sukowiyono juga menjelaskan bahwa kondisi lahan pertanian sudah tidak sebagus dulu dan sudah susah untuk *dititeni*¹⁵ Selain produk-produk teknologi, globalisasi menjerat kehidupan masyarakat pedesaan lebih dalam lagi melalui invensi pertanian. Yaitu dengan merubah sistem pertanian yang berdantung pada industri pertanian global, mulai dari bibit, pupuk, sampai perlakuan pasca panen semuanya sudah tidak bisa lepas lagi dari cara-cara baru yang menggantikan cara-cara konvensional (cara-cara yang diwariskan leluhur sudah mulai luntur). Sejak masa orde baru tepatnya pada tahun 1970 desa telah dijadikan objek dalam setiap produk kebijakan pertanian, salah

¹⁴ Hasil wawancara bersama ketua Poktan Karya Bakti Desa Purworejo pada tanggal 25 September 2017, tentang kondisi pertanian.

¹⁵ *Dititeni* dan *ditelateni* merupakan bawaan sifat dari leluhur dalam urusan bertani. Artinya adalah setiap masyarakat petani memahami betul tentang apa yang ditanam dan bagaimana saja harus memperlakukan tanaman mereka. Namun sekarang ini sudah mulai hilang budaya warisan leluhur tersebut, karena sudah sulit untuk menghafalkan pola-pola perubahan perlakuan dikarenakan kondisi lingkungan yang telah lama berubah setelah masyarakat desa diperkenalkan dengan teknologi baru dari sistem pertanian modern.

satunya adalah melalui program Revolusi Hijau yang digadang-gadang oleh Suharto dalam rangka meningkatkan produktivitas .¹⁶

Dari pemaparan tersebut sekaligus menjelaskan bagaimana dimensi level global, nasional, dan lokal berinterrelasi melalui program-program yang terintegrasi secara integral. Pada level nasional serba bergantung pada perubahan-perubahan global yang dikarenakan Indonesia telah lama bergantung pada organisasi-organisasi global seperti IMF, WTO, Bank Dunia.¹⁷ Terlebih lagi Indonesia sempat mengalami sistem pemerintahan yang sentralistik dan otoriter selama 32 tahun pada masa orde baru. Sehingga ketika perubahan ke era desentralisasi pada level lokal belum sepenuhnya siap. Salah satu bentuk interrelasi antara level global, nasional, dan lokal adalah ketika Indonesia mulai bergabung dengan WTO pada tahun 1994 yang mewajibkan Indonesia mengikuti seluruh kebijakan-kebijakan perdagangan di dalam negeri. Seperti halnya mengenai meningkatnya impor barang murah yang mulai dilakukan sejak krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 yang mengakibatkan terjadinya “penyesuaian struktural” (*structural adjustment*) yang didiktekan oleh Bank Dunia dan IMF berupa distorsi pasar lokal (sistem distribusi dan sistem perdagangan bahan pangan).¹⁸

Berdasarkan catatan sejarah tersebut menjadikan pemetaan praktik demokrasi di pedesaan Jawa menjadi hal yang sangat penting sebelum mengupas lebih dalam bagaimana anomali otonomi desa dapat terjadi di Desa Purworejo.

¹⁶ Hira Jhamtani (2008), *Lumbung Pangan Menata Ulang Kebijakan Pangan*, Yogyakarta: INSISTPress, hlm, 97.

¹⁷ Viviane Manoppo (2007), *Utang Luar Negeri Indonesia* dalam *Jurnal of Indonesian Applied Economic* Volume.1 Nomor.1, hlm, 42.

¹⁸ Hira Jhamtani (2008), *Op.cit.*, hlm,101.

Desa Purworejo merupakan desa dengan tipe desa pertanian yang mana hampir seluruh masyarakat desa menggantungkan mata pencahairannya pada hasil pertanian (sawah, ladang, kebun, dan peternakan). Sedangkan dalam kehidupan sosialnya masih sangat kental dengan pengaruh tradisi Jawa antara lain nilai-nilai *tepa slira*, *unggah-ungguh*, *guyub rukun*, dan tradisi ritual lainnya.¹⁹ Kedua hal tersebut menjadi faktor penting dalam mempengaruhi praktik demokrasi yang dicerminkan melalui implementasi otonomi desa di Desa Purworejo. Namun kearifan-kearifan lokal tersebut harus tergerus dengan sistem politik yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu yang panjang.

5.1.2 Dimensi Kekuasaan *Space* di Desa Purworejo

Dimensi kedua dari *Powercube Theory* adalah dimensi ruang/*space* yang mana konteksnya adalah ruang-ruang yang memungkinkan menjadi tempat beroperasinya kekuasaan. Dimensi ini digunakan untuk membedah bagaimana sebenarnya sistem kekuasaan dalam era otonomi desa ini beroperasi. Apakah sama saja dengan era-era sebelumnya ataukah ada perbedaan yang cukup mendasar dalam pengaplikasiannya.²⁰

Pengaplikasian undang-undang desa sejatinya dapat direfleksikan melalui praktik-praktik politik dan pola-pola hubungan elit dengan masyarakat. Dalam dimensi *space* refleksi tersebut dapat dipetakan menjadi tiga ruang yaitu ruang tertutup, ruang yang diperkenankan, serta ruang yang diciptakan, dan ketiganya saling memiliki interrelasi. Pada ruang tertutup berarti tidak adanya kesempatan

¹⁹Hasil wawancara dengan Kepala Desa Purworejo Ngantang pada 25 September 2017

²⁰Abdul Halim (2014), *Op.*, Cit, hlm, 65.

masyarakat desa untuk mengakses sebuah informasi tentang sebuah agenda. Hal ini berangkat dari pandangan yang telah lama mengakar yaitu bagaimana elite politik memandang subordinat masyarakat desa.²¹

Memandang subordinat dalam hal ini maksudnya adalah telah melekat stigma bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang terbelakang, berpendidikan rendah, serta tingkat ekonomi yang rendah pula sehingga tidak mungkin untuk berpikir maju. Stigma tersebut tidak hanya berkembang pada elit tingkat nasional hingga daerah, melainkan pada elit desa sendiri.²² Bentuk konkritnya adalah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Purworejo yang terlibat hanyalah perangkat desa dan elit desa saja. Berlanjut pada musrenbangdes yang membahas RKPD Kabupaten Malang yang juga hanya dihadiri oleh elit pemerintah daerah dan elit pemerintah desa saja. Lebih dalam lagi, masyarakat desa Purworejo Ngantang tidak tahu rencana tentang program-program yang disusun oleh elit dan tidak dilibatkan dalam proses pra penyusunan program. Padahal penyusunan RKP tersebut pada era otonomi desa pasca UU Nomor.6 Tahun 2014 sangatlah penting untuk menentukan alokasi Dana Desa dalam satu periode. Dalam hal ini pembentukan RKP menjadi sebuah ruang kekuasaan yang lebih eksklusif.

²¹Idris Thaha (2005), *Demokrasi Religius*, Jakarta: TERAJU, hlm,226.

²²Hasil observasi di lapangan oleh penulis. Pandangan tersebut tersirat ditangkap penulis dari cara para elit desa berbicara ketika ditanya tentang partisipasi masyarakat desa pada aktivitas politik, sosial, dan ekonomi desa.

5.2 Bentuk Anomali Implementasi Otonomi desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan sebuah langkah untuk mengangkat kembali eksistensi desa yang sempat redup pasca pengimplementasian UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.²³

Yang mana pada saat itu dengan adanya UU tentang pemerintahan daerah tersebut menyebabkan penyusutan otonomi desa dan diakibatkan oleh semakin besarnya hak mengatur dan mengurus yang dikembangkan oleh pemerintah daerah atas nama hak dan kewajiban otonomi.

Sebenarnya penyusutan otonomi desa telah terjadi sejak penerapan UU No.5 Tahun 1979 yang mana pada masa orde baru tersebut kedudukan desa menjadi *powerless*.²⁴ Pada masa Soeharto, pemalsuan identitas kumpulan masyarakat dalam bentuk desa terus menerus diproduksi. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai macam kebijakan-kebijakan *uniformitas* yang menghancurkan sistem-sistem mikro di desa. Desa dan perangkatnya bertransformasi menjadi sebuah mesin efektif untuk menciptakan sistem birokrasi yang bersifat *top down*. Dibangun dengan logika kepatuhan dengan masyarakat desa sepenuhnya tidak memegang kendali atas keputusan yang mandiri.²⁵

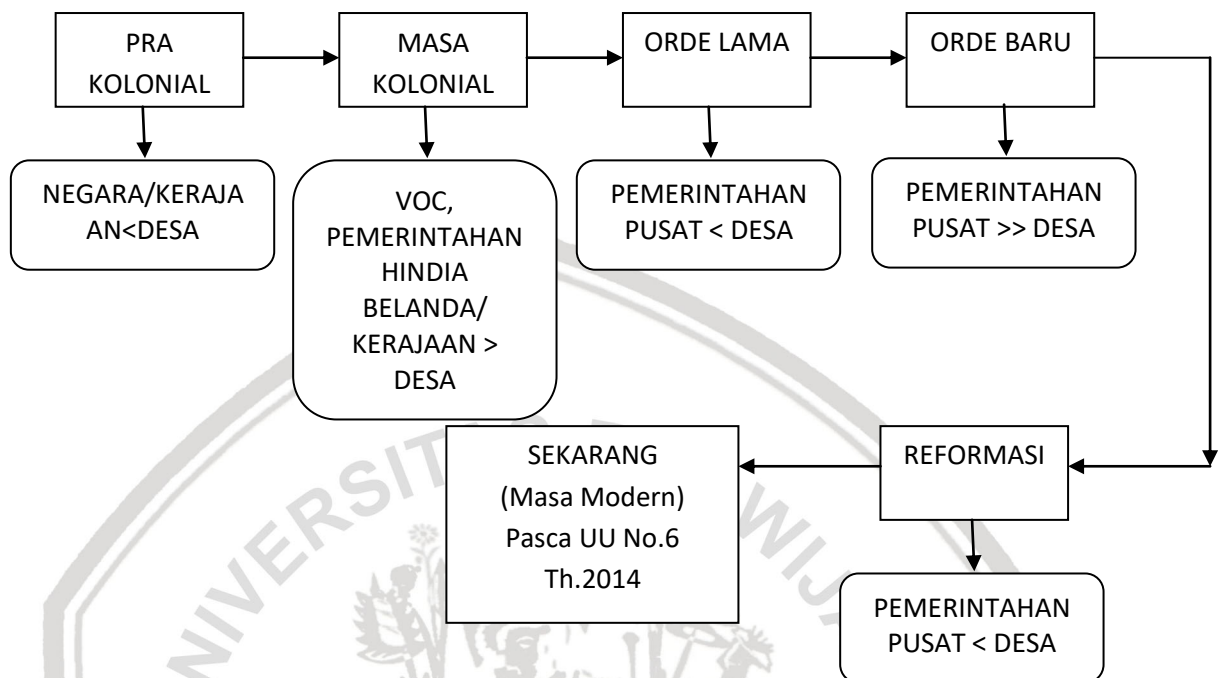
Adapun skema periodisasi fase naik turunnya otonomi desa dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

²³ Makna redup ditengarai oleh perubahan-perubahan dalam Undang-Undang yang meminimalisir peran desa yang dikembalikan kepada pemerintah daerah.

²⁴ G.W. Murjana Yasa (2011), *Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Bali* dalam Jurnal Ekonomi dan Sosial, Jakarta: INPUT, hlm, 88.

²⁵ Muhadam Labolo (2015), *Dinamika Politik Lokal dan Pemerintahan Lokal*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm, 168.

Gambar 1 Skema Periodisasi Fase Otonomi Desa di Indonesia



Sumber: Diolah penulis (2018) berdasarkan Dany Lombard (2005)²⁶

Bagan di atas adalah fase periodisasi otonomi desa yang penulis rangkum mulai dari masa pra kolonial hingga masa reformasi. Dari bagan di atas dapat dilihat bahwa berjalannya otonomi desa didasarkan pada kuat lemahnya otoritas di luar desa dalam mengorganisir masyarakat desa yang notabene telah ada jauh sebelum pra kolonial dengan pola-pola kehidupan yang maju. Dalam penelitian ini nantinya akan menyajikan simpulan tentang bagaimana karakter otonomi desa pada era modern dengan adanya UU Desa di Indonesia mulai tahun 2014.

Dalam hemat penulis pengimplementasian otonomi desa melalui UU Nomor 6 tahun 2014 di Desa Purworejo Ngantang menggambarkan kondisi

²⁶ Dany Lombard (2005), *Nusa Jawa III (Silang Budaya): Warisan Budaya Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

double burden yaitu untuk mengembalikan otonomi asli desa yang telah dirampas orde baru (dalam konteks waktu fase paling dekat), dan secara bersamaan juga mengembangkan otonomi desa untuk memberikan batasan bagi intervensi otonomi daerah pasca-reformasi. Beban ganda yang dipikul oleh otonomi desa sekarang ini menyebabkan ditemukannya beberapa anomali implementasi otonomi desa secara substansi yang ditemui di lapangan.

5.1.2 Destruksi Kearifan Lokal Desa

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa otonomi desa telah mengalami fase periodisasi yang sangat panjang dengan latar belakang sosial politik yang beragam. Melalui fase tersebut dapat ditarik sebuah pola yang hampir sama yaitu pola antara pihak negara dan pihak lain di luar negara (*supra village*) dengan desa itu sendiri. Apabila dipandang dengan dimensi yang luas maka banyak muncul dialektika-dialektika serta fenomena-fenomena baru yang muncul. Seperti halnya anomali yang ditemukan dalam implementasi otonomi desa, beberapa anomali praktik otonomi desa disinyalir menjadi sebab ketidak optimalan sebuah cita-cita baik di belakangnya seperti halnya yang ditemukan di Desa Purworejo yaitu pola-pola *local wisdom destruction* (perubahan yang bersifat destruktif pada sistem kearifan lokal di desa).²⁷ Maksudnya adalah dengan panjangnya perjalanan demokrasi yang kemudian telah menurunkan dinamika konsep tentang otonomi desa, berdasarkan teori *powercube* tertangkap sebuah fenomena bahwa dasar dari

²⁷ *Local wisdom destruction* maksudnya adalah sebuah gejolak, perubahan drastis, pengaburan dari kearifan lokal pedesaan yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat desa. Destruksi sistem kearifan lokal biasanya menimbulkan sebuah kebingungan dan inkonsistensi dari sistem budaya di pedesaan.

segala bentuk perubahan yang mempengaruhi implementasi otonomi desa adalah kearifan lokal desa yang telah lama terbentuk di Desa Purworejo.

Desa Purworejo sendiri merupakan desa dengan tipologi desa tradisional dengan kecenderungan sampai pada tahap masa transisi. Dapat dilihat pada pola penyelenggaraan tata desa masih bersifat tradisional dimana karakter masyarakat Jawa agraris yang masih melekat kental seperti halnya cara pemilihan kepala desa, cara bermasyarakat, hingga cara pemenuhan ekonomi sehari-harinya. Dalam struktur pemerintahan desa juga masih tradisional dengan masih menggunakan istilah *carik*, *kamituwo*, *modin*, *kuwowo*, *kebayan*, dll.²⁸ Selain itu tata pemerintahan desa juga masih belum tertata rapi seperti halnya desa yang geografisnya berada di dekat pusat pemerintahan kota. Purworejo termasuk desa yang masih cenderung terpencil karena akses ke tengah kota masih jauh. Secara kultural fungsi lembaga desa seperti BPD masih belum optimal, hal tersebut ditengarai akibat masih bergantungnya masyarakat desa dengan pola-pola kehidupan ekonomi tradisional yang cukup menyita waktu dan tenaga.

Transisi otonomi desa pasca rekondisi otonomi desa di Indonesia melalui UU Nomor 6 tahun 2014²⁹ memunculkan sebuah kebingungan pada berbagai sisi dan sudut pandang pengimplementasiannya. Hal yang paling kuat dan menjai muara adalah destruksi dalam kearifan lokal desa/ (*distruction of local wisdom*). Ketika keragaman desa telah di akui sebagaimana dikoreksi sebelumnya pada UU No.32 tahun 2004 yang menegaskan kembali keragaman desa dan mengembalikan

²⁸Dapat dilihat pada bagan struktur desa pada BAB II

²⁹Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 Pasal 31, Tentang Desa

fungsi desa untuk mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal-usul, namun pada kenyataannya desa masih terikat secara administratif.

Letak distruksi kearifan lokal ebih jelas dapat dimaknai melauai gagasan Ina E. Slamet bahwa akar dari budaya di desa adalah nilai-nilai demokrasi yang sama sekali berbeda dengan demokrasi dari barat, melainkan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai tradisional primitif yang tidak mengenal stratifikasi sosial.³⁰ Yang diperkuat lagi oleh Koentjoro Poerbopranoto bahwa bentuk demokrasi kesatuan masyarakat desa adalah demokrasi musyawarah, demokrasi gotong royong dan telah lama dianut masyarakat tradisional pedesaan.³¹

Pada UU No.6 Tahun 2014 Pasal.31 telah diatur tentang pemilihan kepala desa, yang artinya setiap kepala desa harus melalui tahap pemilihan kepala desa. Hal ini berbenturan dengan cita-cita dari otonomi desa yang menekankan pada pengakuan atas budaya-budaya bawaan yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat desa. Pada akhirnya posisi kepala desa memiliki dua sisi yang pertama sebagaimana pada kepercayaan masyarakat desa bahwa peran kepala desa dalam aspek budaya adalah sebuah simbol bagi integrasi kepentingan makro-kosmos (alam atas, supra desa), dan mikro-kosmos (alam bawah, infradesa). Hal tersebut diterjemahkan oleh Thoedore Smith, bahwa kepala desa di Indonesia pada hakekatnya memiliki dua aspek penting yaitu pengakuan secara tradisional masyarakat dan sekaligus mewakili pemerintah di desa maupun *supra desa*.³²

³⁰Ina E.Slamet (1965), *Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa*, Jakarta: Bharata, hlm,64.

³¹Sadu Wasistiono (1993), *Loc.,cit*, hlm,83.

³²Muhamad Labolo (2015), *Ibid.*, hlm,170.

5.2.1.(a) Destruksi Kearifan Lokal Politik

Di Desa Purworejo sendiri memiliki sebuah sistem budaya yang telah lama dipegang teguh oleh seluruh masyarakat desa. Dan seluruh masyarakat desa bisa dipastikan hidup dalam budaya masyarakat tradisional Jawa. Di dalam budaya masyarakat tradisional Jawa implementasi konsep demokrasi sangatlah berbeda dengan konsep demokrasi dari barat hingga saat ini seperti halnya dijumpai pada Desa Purworejo Ngantang.

Masyarakat Desa Purworejo sangat kental memegang budaya Jawa dalam berbagai aspeknya. Pun dengan budaya politik yang berkembang disana, semua berdasarkan pada sebuah tatanan yang telah lama dipegang oleh masing-masing individunya dan menjadi sebuah karakter yang kuat. Undang-undang Desa No.6 Tahun 2004 merupakan salah satu wujud dari masuknya nilai-nilai demokrasi modern dan diberlakukan pada desa-desa termasuk pada Desa Purworejo Ngantang. Di dalamnya diatur secara lengkap tentang bagaimana struktur pemerintah desa dipilih dan bekerja. Salah satu yang sempat menjadi dilema di Desa Purworejo adalah mengenai pemilihan Kepala Desa yang dipilih melalui sebuah proses pemilihan dengan mekanisme yang telah diatur di dalam undang-undang.

Masyarakat Desa Purworejo Ngantang telah lama memegang kepercayaan dalam budaya memilih seorang pemimpin mereka. Yang mereka pertahankan selama ini adalah menentukan pemimpin mereka melalui kepercayaan terhadap

Pulung.³³ Selain itu logika cara memandang kepala desa masyarakat Desa Purworejo berbeda dengan logika modern. Masyarakat Desa Purworejo yang memiliki karakter *nriman*³⁴ dalam observasi lebih lanjut, maksud dari kepercayaan tersebut bukan berarti masyarakat Desa Purworejo tidak peduli, melainkan sifat kohesifitas serta sifat mempertahankan kerukunan masyarakat sangatlah kental. Dan sejak lama pula pola hubungan pemimpin dan rakyat adalah sebuah hubungan yang mutualistik. Pemimpin Desa Purworejo selama ini adalah sosok yang mengayomi/dipandang sebagai bapak. Dan semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat diakomodir melalui musyawarah ataupun pendekatan yang dilakukan sosok pemimpin sendiri.

Dengan adanya aturan tentang pemilihan kepala desa pada akhirnya terjadi pergeseran-pergeseran kearifan lokal dalam masyarakat Desa Purworejo sendiri. Banyak masyarakat yang masih memegang teguh kepercayaan-kepercayaan tersebut, namun juga ada yang sudah lama telah digeser oleh sistem kekuasaan otoriter yang ditinggalkan oleh orde baru.

*“Di Purworejo Mbak, sakjane wis ono kepercayaan dari leluhur desa. Masyarakat desa sini masih mempercayai pulung. Dan orang yang dijatuhi pulung sejak lama memang dapat mengemban amanat masyarakat desa. Memang sekarang ini hampir sudah tidak ada yang bisa lihat pulungnya Mbak, sesepuh desa wis akeh sing seda. Tapi wong-wong sini sudah tau trahnya masing-masing calon iku piye.”*³⁵

³³ Sebuah cahaya yang datang di atas rumah seseorang yang memiliki kepantasan dan dipercaya mampu memimpin desa.

³⁴ Dalam bahasa Indonesia *nriman* berarti menerima dengan lapang dada nasib dan apapun yang datang pada mereka.

³⁵ Wawancara bersama Bapak Hery Prayitmo selaku kebayan Desa Purworejo, Ngantang Tanggal.20 September 2017 tentang kearifan lokal Desa Purworejo.

Adanya undang-undang desa yang mengatur tentang pemilihan kepala desa pada akhirnya menimbulkan sikap yang dilematis.³⁶ Pergeseran budaya yang kian lama kian terasa memicu adanya distruksi kearifan lokal desa yang ada sebelumnya. Munculnya suasana kompetitif dalam aktivitas pemilihan kepala desa, meleburkan budaya desa yang sebelumnya berpegang pada tatanan yang rukun dan stabil. Hal ini menjadikan karakter masyarakat Desa Purworejo menjadi rentan terhadap kepentingan-kepentingan yang datang dari luar desa.

Dengan masih dipegang teguhnya kepercayaan di Desa Purworejo, maka mekanisme pemilihan kepala desa di Desa Purworejo sudah tidak diperlukan lagi. Masalah yang muncul ketika hal tersebut terus dilakukan adalah munculnya gesekan antar kelompok masyarakat yang tidak perlu. Selain itu gelontoran dana yang cukup besar dapat dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak dan penting seperti halnya agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Ketika pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan, peruncingan perbedaan antar kelompok masyarakat akan semakin tajam dan merugikan masyarakat desa sendiri.

Pada kasus ini anomali implementasi otonomi desa apabila dikaji dalam perspektif Ferdinand Tönnies karakteristik *gemeinschaft*³⁷ dikhawatirkan akan hilang. Hal tersebut terbukti dalam hasil observasi penulis bahwa dengan rentang waktu yang panjang era orde baru dan transisi pada masa reformasi masyarakat mengalami *culture system distruction* dalam bentuk konkritnya adalah masyarakat

³⁶ Yumiko M. Priyono dan Priyono Tjiptoherijanto (2012), *Op., Cit.*, hlm.41.

³⁷ Merupakan karakteristik bersifat *community* (paguyuban) dengan ciri-ciri antar masyarakat masih terikat kuat secara emosional, memiliki tradisi yang kuat dan dijunjung tinggi. Serta penentuan keputusan bersifat *bottom up*.

bingung untuk menentukan mana yang harus dipegang teguh dan dipercayai. Selain itu akibat lelah berhadapan dengan situasi yang kompetitif dan rentan konflik sebagian masyarakat Desa Purworejo menjadi acuh dalam proses politik di desa. Rata-rata yang acuh adalah masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai leluhur dan kelokalan desa.³⁸

5.2.1.(b) Transformasi Kearifan Lokal Desa

Berlangsungnya implementasi otonomi desa yang cenderung dipaksakan pada masyarakat Desa Purworejo Ngantang yang telah lama menganut kearifan lokal dan budaya leluhur menimbulkan sebuah transformasi kearifan lokal politik desa. Transformasi tersebut disebabkan oleh telah mendarah dagingnya sebuah nilai kearifan lokal dari leluhur sampai pada hal keburukan apa yang terjadi ketika kearifan lokal tersebut ditinggalkan. Kemudian dengan pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal otonomi desa melalui undang-undang desa, secara perlahan transformasi kearifan lokal masyarakat Desa Purworejo memunculkan *output* perilaku yang kompromis.

Perilaku kompromis tersebut berupa sikap yang menerima perubahan namun masih menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai kepercayaan yang tidak bisa ditinggalkan. Hal tersebut kemudian menjadikan aturan-aturan mengenai desa cenderung dikesampingkan namun tetap dilakukan (tidak segenap hati). Penulis menjumpai di lapangan bahwa dengan adanya undang-undang yang mengatur tata cara pengambilan keputusan di sebuah desa justru memunculkan

³⁸Temuan hasil observasi lapangan di Desa Purworejo Ngantang, Kabupaten Malang

respon yang kurang baik dari masyarakat Desa Purworejo yang sekian lama menjalan kearifan lokal Jawa agraris yang menjunjung tinggi budaya musyawarah (rembug). Mekanisme pengambilan keputusan memunculkan aktor-aktor yang sensitif terhadap pandangan asli masyarakat desa.

Dalam sebuah pembicaraan santai penulis dengan masyarakat desa, mereka bercerita bagaimana perangkat-perangkat desa mulai berubah. Perubahan tersebut mereka amati sebagai bentuk dampak dari wacana-wacana *supra village* sehingga mempengaruhi cara pandang perangkat desa dalam menilai masyarakatnya sendiri. Dalam percakapan tersebut penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa perangkat desa mulai memandang masyarakat desa sendiri merupakan golongan masyarakat yang sangat minim pendidikan sehingga segala bentuk pendapatnya dikesampingkan. Berkurangnya budaya *teposlir* antara pengurus desa dengan masyarakat desanya, sehingga menghilangkan pandangan bahwa pemimpin adalah sosok pengayom masyarakat. Hal tersebut menyebabkan munculnya transformasi kearifan lokal masyarakat desa mulai dari cara memandang seorang pemimpin, sampai cara masyarakat desa menentukan sebuah keputusan.

5.1.2 Disintegrasi Antar Lembaga Pemerintah Desa dengan Lembaga *Supra Village*

Temuan anomali otonomi desa selanjutnya adalah disintegrasi antar lembaga pemerintahan desa dengan lembaga *Supra Village*. Disintegrasi antar lembaga ini penulis temukan dalam praktik fungsional antar lembaga dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintahan desa dalam konteks otonomi desa merupakan

subjek dari setiap aksi atau keputusan.³⁹ Artinya pemerintah desalah yang berfungsi sebagai fondasi serta penyaring dari kebijakan-kebijakan internal desa maupun *supra village* yang berlandaskan kepentingan masyarakat desa. Namun di lapangan ditemukan fakta bahwa tidak adanya koordinasi yang baik ketika lembaga *supra village* memiliki agenda terhadap pemerintahan Desa Purworejo.

Implikasinya adalah, ketika penulis mengkonfirmasi tentang program dari lembaga *supra village* pihak pemerintah Desa Purworejo kurang memahami agenda tersebut dan menyarankan penulis untuk langsung menghubungi pihak terkait. Hal ini menjadi sebuah fakta yang cukup meresahkan dalam era otonomi desa, apabila hal seperti ini terus berlangsung maka sangat mudah sekali pihak luar untuk ikut campur bahkan turut mengatur apa yang terjadi di Desa Purworejo Ngantang.

5.2.2.(a) Disintegrasi antara Pemerintah Desa dengan Kementerian Pertanian, dan Dinas Pertanian

Sudut pandang dalam memposisikan Pemerintah Desa dalam era otonomi desa hingga saat ini belumlah berganti. Pemerintah Desa masih dianggap sebagai lembaga terendah yang kurang memiliki wewenang untuk menentukan kebijakan bagi desanya sendiri. Di Desa Purworejo Ngantang ditemukan praktik-praktik yang mencerminkan adanya disintegrasi antar lembaga pemerintah desa dan lembaga pemerintah *supra village*. Yang pertama adalah, tidak terlibatnya pemerintah desa dalam penentuan bidang apa saja yang menjadi fokus dari

³⁹ Muhamad Ramli (2013), *Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah* dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Volume.II Nomor.2 Juli-September, hlm, 322.

pembangunan dari pemerintah pusat maupun daerah. Yang terjadi di lapangan adalah pemerintah desa hanya mendapatkan pemberitahuan saja bahwa akan ada lembaga yang turun lapangan dengan tujuan membantu masyarakat desa untuk mengembangkan aktivitas sosial, politik, dan ekonominya.

Di Desa Purworejo sendiri telah menerima beberapa lembaga yang datang untuk turut membantu masyarakat, paling sering adalah lembaga pertanian karena rata-rata penduduk Desa Purworejo adalah masyarakat petani. Masing-masing lembaga membawa kepentingan sendiri untuk dikerjakan di Desa Purworejo Ngantang. Berdasarkan dari penuturan beberapa masyarakat petani bawang merah banyak lembaga seperti Kementerian Pertanian yang diwakili oleh BPTP (Badan Pengkajian Teknologi Pertanian) yang datang untuk mengajarkan kepada petani tentang teknologi pertanian sehingga dapat meningkatkan hasil pertanian.⁴⁰ Kemudian ada dari Dinas Pertanian yang hadir dengan diwakili oleh PPL (Penyuluh Lapangan). Kedua lembaga tersebut hadir dalam waktu yang berbeda, terkadang juga bersamaan. Namun kedua lembaga tersebut berjalan sendiri-sendiri bahkan cenderung tidak sinkron satu sama lain. Dalam hal ini seorang penyuluh yang telah memiliki pengalaman yang panjang dalam penyuluhan pertanian ke desa-desa menjelaskan jika selama ini Kementerian dan Dinas seringkali tidak sinkron dalam menjalankan sebuah program kerja, padahal yang ditangani adalah satu desa yang sama.

⁴⁰ BPTP merupakan sebuah lembaga di bawah Kementerian Pertanian yang memiliki fungsi sebagai lembaga pengkaji teknologi pertanian. Semua pegawai disana merupakan para ahli di bidang pertanian. Untuk konteks di Purworejo, BPTP Jawa Timur yang berada di Karang Ploso lah yang turun lapang di Desa Purworejo.

“Selama saya amati lembaga pemerintah ini masing-masing punya ego yang tinggi mbak. Dari kementerian sudah ada usaha untuk menyinkronkan namun dinas seolah mempersulit. Padahal bukan apa ya Mbak, di dinas itu paling juga ya ngapain. Banyak yang tidak menguasai lapangan para penyuluhnya. Beda dengan kami dari kementerian, setiap penyuluh yang dikerahkan memang sudah tupoksinya disitu.”⁴¹

Apa yang disampaikan Ibu Baswarsiati di atas benar-benar penulis temui di lapangan setelah satu bulan ikut turun lapangan langsung bersama tim BPTP Jawa Timur. Petani juga mengeluhkan hal serupa, bahwa ketika banyak lembaga yang turun lapangan dengan program yang tidak terkoordinasikan antar lembaga petani kebingungan dan justru muncul kecenderungan tidak menghiraukan. Hanya sekedar mengambil hal yang dianggap menguntungkan seperti halnya bantuannya saja yang diterima, namun dalam aplikasi program yang disarankan tidak tahan lama dipraktikkan.

5.2.2.(b) Disintegrasi Pemerintah Desa, Lembaga *Supra Village* Desa, dan CSR

Selain dari Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian, dalam rangka menjalankan programnya Desa Purworejo juga dijadikan binaan oleh sebuah CSR yaitu PT.Gudang Garam.PT Gudang Garam dengan program yang bertujuan untuk turut memajukan pertanian di Desa Purworejo. Dari ketiga pihak yang hadir di desa Purworejo Ngantang tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu

⁴¹ Wawancara berasma Penyuluh Senior dari Kementrian Pertanian Ibu Ir. Baswarsiati tentang sinkronisasi antar lembaga pemerintah dalam penyuluhan di Desa Purworejo Ngantang. Pada tanggal 15 Agustus 2017

membantu masyarakat Desa Purworejo dalam meningkatkan taraf ekonomi melalui peningkatan kualitas dan kuantitas hasil panen. Namun ketiga pihak di atas hadir secara bersamaan namun tidak saling terintegrasi satu sama lain. Hal tersebut menurut Bapak Murjiono selaku Ketua Bidang Sosial Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Malang sebagai cermin dari disintegritas antar lembaga serta wujud dari egoisme setiap lembaga. Sehingga antar lembaga merasa memiliki kapasitas masing-masing dan mengesampingkan koordinasi. Hal ini apabila dibiarkan akan berdampak negatif bagi Desa serta bagi lembaga terkait.⁴²

Pertama adalah, desa dirugikan karena tidak ada komunikasi yang mendalam sebelum lembaga turun lapangan sehingga program yang dibawa lembaga tidak tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat desa. Kedua adalah, bagi lembaga yang terkait terjadi pemborosan anggaran karena program yang mereka bawa sering kali sama dengan lembaga lain, sehingga terjadi penumpukan. Hal tersebut akan lebih baik ketika antar lembaga saling berkoordinasi dan seluruh program tersinkronisasi dari pusat hingga ke daerah.

*“kurangnya koordinasi antar lembaga memang sudah menjadi penyakit lama dalam birokrasi kita Mbak. Gitu itu kan eman uangnya, padahal bisa untuk keperluan lain yang lebih penting dan mendesak. Itu kenapa pemborosan anggaran hingga sekarang ini susah dipangkas. Tiap lembaga sama-sama egoisnya. Merasa paling penting semua programnya. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau soal karena cari ceperan dari proyek yang didompleng lewat programnya Mbak.”*⁴³

⁴²Hasil wawancara bersama Ketua Bidang Sosial Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Malang tentang bagaimana seharusnya koordinasi antar lembaga dalam era otonomi daerah. Pada tanggal 21. September 2017

⁴³Hasil wawancara bersama Ketua Bidang Sosial Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Malang tentang disintegrasi antar lembaga pemerintah. Pada tanggal 21. September 2017

PT.Gudang Garam datang ke Desa Purworejo juga tidak berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah desa. Namun langsung datang pada gapoktan. Penulis telah berusaha untuk mengkonfirmasi langsung hal ini pada pihak PT.Gudang Garam, namun hanya dapat memberikan keterangan sekedarnya melalui sms, selebihnya tidak lagi memberikan respon.

5.3 Kepentingan Kelompok (*Interest Group*)

Desa Purworejo Ngantang merupakan desa penghasil bawang merah terbesar di Kabupaten Malang dan menjadi salah satu sentra bawang nasional. Potensi desa tersebut sebenarnya sudah sejak lama namun kurang diperhatikan dan kurang terwadahi. Dampaknya adalah hasil panen masyarakat Desa Purworejo tidak tersalurkan dengan maksimal seperti 1) Jatuhnya harga hasil panen bawang merah, 2) Ketika penghasilan pasca panen tidak maksimal, para petani akhirnya rugi dan terikat hutang dimana-mana, 3) Munculnya ketidakpercayaan masyarakat dengan pemerintah karena tidak adanya langkah antisipasi dari lembaga *supra village*.

5.3.1 Kepentingan BULOG

Pada tahun 2014 Dirjen Pertanian beserta Tim Kementrian Pertanian mendatangi Desa Purworejo dengan agenda pengukuhan komoditas unggulan bawang merah Desa Purworejo sebagai salah satu sentra nasional setelah Probolinggo dan Nganjuk. Berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat petani bawang merah di Desa Purworejo, kedatangan Dirjen Pertanian beserta Kementerian

Pertanian sekaligus menggandeng BULOG yang akan dijadikan mitra petani. Fungsinya adalah mewadahi hasil panen petani bawang merah di Desa Purworejo Ngantang dan membeli dengan harga yang layak agar tingkat ekonomi masyarakat desa dapat terangkat. Kemudian menyalurkan hasil panen tersebut langsung pada masyarakat dengan tujuan untuk memotong rantai distribusi.

Pada kesempatan pertama hubungan kemitraan antara BULOG dengan petani yang diwadahi oleh Gabungan Kelompok Tani (gapoktan) Karya Bakti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan awal yaitu hasil panen tersalurkan dan petani bawang merah mendapatkan harga yang tidak rendah. Pada saat itu harga bawang merah berkisar antara Rp14.000/kg sampai Rp18.000/kg dari petani dan BULOG sepakat membeli dengan harga Rp18.000/kg dengan tujuan BULOG turut mengangkat ekonomi masyarakat Desa Purworejo.⁴⁴ Hubungan petani, gapoktan, dan BULOG berjalan dengan baik dan saling menguntungkan setelah BULOG menyepakati harga bawang merah dari petani.⁴⁵

Pada masa panen selanjutnya hasil panen bawang merah di Desa Purworejo tidak berkurang kuantitas dan kualitasnya, namun harga bawang merah nasional sedang anjlog. Ketika itu BULOG datang dan mengambil bawang merah dari Desa Purworejo, namun kali ini BULOG tidak mau mengambil dengan harga

⁴⁴ Penulis berusaha untuk menggali lebih dalam pada pihak BULOG. Namun penulis mengalami kesulitan untuk mengkonfirmasi data tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya Poktan memahami siapa sebenarnya pihak BULOG terkait, yang masyarakat tahu adalah pihak BULOG pertama kali datang bersama dengan Dirjen Pertanian. Penulis sudah berusaha menghubungi namun tidak mendapatkan respon yang baik

⁴⁵ Handewi Purwati Saliem, (2005), *Managemen Ketahanan Pangan di Era Otonomi Daerah dan BULOG*, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, hlm, 57.

yang petani tawarkan. Harga bawang merah di pasar saat itu adalah Rp11.000/kg sedangkan BULOG meminta dengan harga yang jauh di bawah harga pasar sebesar Rp7000/kg sampai Rp8000/kg. Dengan tindakan BULOG tersebut masyarakat petani bawang merah Desa Purworejo merasa sangat dirugikan.

Kerugian petani bawang merah Desa Purworejo dikarenakan 1) Akibat bermitra dengan BULOG, maka petani tidak lagi bergantung pada tengkulak seperti sebelumnya, 2) Pada perjanjian antar dua pihak BULOG bersedia membeli hasil panen sesuai dengan harga pasar pada petani di Desa Purworejo. Namun pada kenyataannya justru BULOG meminta dengan harga yang jauh di bawah harga pasar, 3) Lebih dirugikan lagi karena BULOG terlambat mengambil hasil panen bawang merah milik petani, dengan posisi para tengkulak sudah tidak ada lagi yang menawarkan hasil panen petani. Sedangkan BULOG datang dengan terlambat dan menawarkan harga yang jauh dengan harga paling rendah di pasar. Secara tidak langsung petani bawang merah Desa Purworejo dihadapkan pada pilihan yang sama-sama rugi dan menjadi pihak yang dirugikan.

Digandeng oleh Dirjen Pertanian dan Kementrian Pertanian, pada mulanya BULOG hadir sebagai pihak yang akan membantu petani bawang merah untuk meningkatkan ekonominya. Namun tabiat aslinya muncul ketika BULOG datang tanpa digandeng Dirjen Pertanian dan Kementerian Pertanian, yaitu mencari untung lebih dengan memanfaatkan kedekatan akses pada petani bawang merah untuk mendapatkan harga yang murah. Tindakan yang BULOG lakukan sempat menimbulkan konflik beberapa lama antara gapoktan dan BULOG. Gapoktan memperjuangkan agar dapat menerima ganti rugi namun tidak juga didapatkan.

Akhirnya mulai saat itu masyarakat petani bawang merah Desa Purworejo antipasti terhadap BULOG dan muncul rasa trauma berhubungan dengan pihak luar yang tujuannya ingin bermitra dengan petani bawang merah.⁴⁶

5.3.2 Kepentingan PT.Gudang Garam

Sejak Desa Purworejo Ngantang gencar mengembangkan potensi bawang merah sebagai komoditas unggulan dan menjadi salah satu sentra bawang merah nasional, banyak lembaga serta kelompok kepentingan hadir untuk menyumbangkan program kepada warga desa. Yang penulis temukan selain lembaga-lembaga pemerintah seperti yang telah dijelaskan di atas, serta BULOG yang hadir sebagai stabilisator harga, kemudian ada satu lagi yaitu PT.Gudang Garam.⁴⁷

Berdasarkan informasi yang penulis gali dari tokoh-tokoh Gapoktan di Desa Purworejo Ngantang, untuk kali ini PT.Gudang Garam justru datang bukan untuk bermitra dengan petani tembakau melainkan datang pada petani bawang merah. PT.Gudang Garam menawarkan kerjasama berupa hubungan timbal balik yang menurutnya saling menguntungkan. Bentuk kerjasamanya adalah masyarakat desa diminta untuk mengumpulkan bungkus rokok Gudang Garam kemudian akan diganti dengan beberapa hadiah bagi warga serta pendampingan dalam teknologi petanian bawang merah. Hal ini cukup menggantal dikarenakan

⁴⁶ Temuan baru penulis saat observasi lapangan di Desa Purworejo Ngantang Kabupaten Malang.

⁴⁷ PT.Gudang Garam merupakan sebuah perusahaan rokok tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1958 dan berada di Kediri Jawa Timur. Untuk memenuhi kebutuhan tembakau PT.Gudang Garam melakukan kerjasama kemitraan dengan petani-petani tembakau di banyak daerah di Indonesia.

dalam riwayatnya PT.Gudang Garam selalu bermitra dengan petani tembakau, namun kali ini justru hadir di tengah-tengah petani bawang merah.

PT.Gudang Garam hadir spade tahun 2017 awal di Desa Purworejo Ngantang. Pertama-tama pihak Gudang Garam langsung mendatangi Ketua Poktan untuk menawarkan program pembinaan. Dan sudah hampir satu tahun ini PT.Gudang Garam memberikan pembinaan dan bantuan kepada masyarakat petani bawang merah di Desa Purworejo. Sese kali PT.Gudang Garam pernah mengadakan kompetisi untuk mengumpulkan bungkus rokok. Sebagai hadiahnya masyarakat yang memenangkan kompetisi dijadikan model iklan dalam spanduk-spanduk rokok gudang garam.⁴⁸

Dalam sebuah wawancara, penulis menelisik apa sebenarnya kepentingan PT.Gudang Garam hadir di Desa Purworejo Ngantang.

*“Saya juga kaget mbak, kok tiba-tiba gudang garam kesini. Saya pikir gudang garam itu cuna bermitra dan bikin program bareng petani mbako. Tapi ternyata kok juga bawang merah. Tapi ya namanya orang butuh mbak disini, selagi menguntungkan ya pasti diterima. Wong orang-orang disini yo ndak mikir kok mbak tentang kepentingan gudang garam. Pokoknya dapat sumbangan wis bungah”.*⁴⁹

Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa PT.Gudang Garam hadir dengan agenda membantu petani untuk mengembangkan teknik pertaniannya. Namun sempat tercetus pada omongan ketua poktan karya bakti tersebut bahwa barang kali untuk jangka panjangnya PT.Gudang Garam akan

⁴⁸ Hal ini sebagai upaya PT.Gudang Garam untuk menarik simpati masyarakat Desa Purworejo terhadap program-program PT.Gudang Garam sendiri.

⁴⁹ Wawancara bersama Ketua Gapoktan Bapak Sukowiyono pada tanggal 21 September 2017 tentang peran PT.Gudang Garam.

menawarkan kepada masyarakat Desa Purworejo untuk menanam tembakau, karena mengingat geografis dan suhu di Purworejo cukup mendukung tumbuhnya tembakau. Namun hingga saat ini pihak Gudang Garam belum berhasil ditemui karena selalu berhalangan.

5.4 Dampak Anomali Implementasi Otonomi Desa

Ditemukannya keganjilan atau anomali dalam implementasi otonomi desa melalui UU No.6 Tahun 2014 yang diterapkan dalam tatanan tradisional pedesaan dataran tinggi seperti Desa Purworejo Ngantang sudah pasti telah menyebabkan perubahan dalam beberapa hal antara lain

5.4.1 Apatisme Politik

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, masyarakat Desa Purworejo Ngantang merupakan masyarakat yang memiliki kohesifitas yang tinggi dan memegang teguh budaya leluhur dan kerukunan sehingga adanya pemilihan kepala desa cenderung memunculkan suasana politik yang kompetitif dan bertolak belakang dengan budaya masyarakat. Dengan adanya pemilihan kepala desa, terjadi gesekan-gesekan yang tidak perlu antar masyarakat yang terkadang juga disusupi kepentingan-kepentingan.

Di Desa Purworejo budaya apatis terhadap proses politik apapun mulai tingkat desa sampai tingkat nasional menjadi dampak yang cukup signifikan setelah munculnya budaya politik yang kompetitif di Desa Purworejo. Hal ini disampaikan setiap kepala dusun kepada Kepala Desa Purworejo Ngantang Bapak Siswaji. Salah satu bentuk apatisme yang nampak adalah upaya masyarakat desa

untuk menolak bentuk kampanye apapun di Desa Purworejo. Hal tersebut menunjukkan jenuhya masyarakat Desa Purworejo dengan aktor politik lokal maupun nasional yang menyampaikan janji palsu. Setelah penolakan tersebut hingga saat ini tidak ada partai politik yang berani masuk untuk berkampanye di Desa Purworejo. Beberapa partai politik yang mencoba masuk namun ditolak antara lain PDIP dan Golkar.

Budaya politik di Desa Purworejo juga dipengaruhi oleh pola kehidupan ekonominya. Sedari pagi masyarakat Desa Purworejo telah disibukkan dengan pekerjaan bertani, perempuan maupun laki-laki. Dalam pola pertanian yang rata-rata adalah perkebunan dimana letak tanah garapan yang cukup luas dan jauh, tenaga masyarakat desa hampir 70% diserap saat proses bertani ini. Siang harinya istirahat sejenak kemudian berlanjut hingga menjelang sore. Dengan pola tersebut maka hanya tersisa sedikit waktu saja, dan dapat dipastikan sisa waktu tersebut dipergunakan masyarakat desa untuk istirahat. Maka pada masyarakat Desa Purworejo kegiatan berpolitik sulit untuk mendapat ruang.

5.4.2 *Inaccurate Policy*

Disintegrasi antar lembaga yang terjun membawa program-program kerja untuk masyarakat desa menyebabkan beberapa dampak yang merugikan bagi pihak desa dan pihak lembaga pemerintah luar desa sendiri. Adanya niat baik dari lembaga *supra village* untuk turut mensukseskan dan mewujudkan otonomi desa tidak bisa optimal ketika masing-masing lembaga mempertahankan egoisme lembaga masing-masing. Hal tersebut setidaknya merugikan beberapa pihak, yang pertama

adalah lembaga pemerintah desa, kedua masyarakat desa, dan lembaga *supra village* sendiri.

Kerugian bagi lembaga desa adalah disintegrasi antar lembaga menyebabkan pemerintah desa tidak bisa mensinkronkan program-program yang sejenis, yang mendukung, dan program-program yang dibutuhkan namun belum tercover oleh pihak pemerintah desa. Sehingga ketika program-program dari *supra village* dilaksanakan ada yang saling bertumpukan. Kemudian kebutuhan-kebutuhan masyarakat desa yang belum bisa terpenuhi oleh pemerintah desa tetap tidak bisa terpenuhi. Sehingga program-program atau kebijakan yang diimplementasikan di Desa Purworejo tidak tepat sasaran karena tidak didasarkan oleh prioritas kebutuhan desa.

Masyarakat desa juga merasakan dampak dari disintegrasi antar lembaga tersebut. Masyarakat merasa kebingungan dalam menjalankan setiap program. Karena dirasa belum tuntas pada program satu, kemudian datang lagi program yang berbeda namun tidak sinergis dan saling tumpang-tindih. Hal yang paling konkrit dirasakan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat desa yang cenderung stagnan. Padahal logikanya ketika adanya bantuan maupun program pemberdayaan diharapkan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.4.3 Stagnasi Ekonomi Pedesaan

Kepentingan kelompok yang datang memanfaatkan keadaan cenderung merugikan masyarakat desa sendiri. Dalam konteks ini, BULOG sebagai pihak kelompok kepentingan yang hadir dengan muka yang berbeda dalam kurun waktu yang

berbeda. Mitra pemerintah yang diharapkan dapat meningkatkan jangkauan penjualan hasil pertanian masyarakat desa justru berbalik arah merugikan financial masyarakat desa dengan mengambil harga bawang merah di bawah harga pasar.

Hal ini menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi masyarakat desa. Karena dengan harapan besar di awal perjanjian, warga desa berani mengambil hutang demi meningkatkan hasil panen yang akan ditebas oleh BULOG. Namun pada kesempatan kedua BULOG tidak memenuhi janjinya sehingga petani rugi besar dan terpaksa juga harus menjual hasil panennya sendiri karena sudah tidak ada tengkulak yang menampung lagi. Akibat lainnya adalah masyarakat desa harus rela sebagian besar hasil panen menjadi busuk karena pemasaran dan pengambilan hasil panen menjadi lambat dan lama.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Anomali yang terjadi dalam implementasi otonomi desa di Desa Purworejo Ngantang merupakan salah satu *sample* dari pola-pola demokratisasi di desa dengan tipe tradisional agraris yang memiliki satu sumber daya alam yang besar dan menjadi sentra nasional. Hal tersebut sangat memungkinkan terjadinya anomali dalam pola-pola otonomi desa yang telah penulis jabarkan sebelumnya. Dengan adanya potensi yang besar, dalam kasus ini Desa Purworejo menarik pihak-pihak *supra village* untuk turut memiliki andil dalam mengelola pemerintahan maupun sumber daya yang dimiliki desa (juga termasuk mengambil keuntungan sepihak di dalamnya).

Berdasarkan beberapa klausul tersebut kemudian menimbulkan gejala-gejala baru dalam pola implementasi otonomi desa di Indonesia .hal ini tidak bisa dipukul rata pada semua desa di Indonesia. Karena sejalan dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dari globalisasi dinamika sosial politik masyarakat menjadi tidak beraturan. Yang seharusnya pola implementasi otonomi desa tiba pada saat kedudukan desa yang kuat justru ada pintu-pintu yang terbuka lebar bagi pihak-pihak *supra village* yang membawa kepentingan sepihak yang sangat merugikan masyarakat desa mpada umumnya,

Maka munculnya Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang desa sudah seharusnya dimaknai dan diimplementasikan dengan memposisikan desa sebagai subjek yang otonom. Jangan sampai ada usaha untuk menutup informasi

atas hak dari pemerintah desa, seperti mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat lokal yang memiliki kekuatan setingkat undang-undang, serta membebaskan desa dengan pilihan-pilihan keputusan desa dalam menyelesaikan sebuah permasalahannya sendiri. Jika hal tersebut tidak beriringan dijalankan, maka anomali-anomali dalam implementasi otonomi desa tersebut akan terus menghadirkan dampak yang tidak baik bagi pemerintahan desa dan masyarakat desa. Yang paling disayangkan adalah stagnasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Purworejo Ngantang. Yang notabene menjadi sentra bawang merah nasional tetapi masyarakatnya tetap miskin dan merugi.

6.2 Rekomendasi

Untuk mengantisipasi agar implementasi otonomi desa dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa harus dilakukan sebuah usaha yang masiv dan terintegrasi. Karena berdasarkan data di lapangan bahwa selama ini antar lembaga pemerintah sangat kurang dalam hal koordinasi dan integrasi antar lembaga.

Selain itu juga di pihak masyarakat Desa sudah seharusnya berani untuk mengimplementasikan bentuk otonomi yang telah ada semaksimal mungkin untuk kepentingan mensejahterakan masyarakat desa dan memajukan potensi desa agar menjadi desa yang benar-benar otonom.

Dalam hal ini penulis memberikan beberapa rekomendasi dengan harapan penelitian dengan tema politik pedesaan dapat mejadi khasanah yang luas dan kaya karena pedesaan merupakan identitas awal dari masyarakat Indonesia. Rekomendasi penulis untuk peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

- Penelitian ini belum mempertimbangkan sejarah antropologis dari pedesaan secara detail sehingga dibutuhkan memperdalam kajian antropologis agar pencarian data dan fakta tidak jauh dari sosio kultural pedesaan.
- Untuk penulis selanjutnya sangat diharapkan dapat menggali agenda-agenda dan aktor-aktor terselubung dari agenda besar otonomi desa sehingga dapat ditemukan motif utama dan terbesar dalam implementasi otonomi desa sendiri.
- Dalam skripsi yang penulis lakukan ini juga sangat terbatas pada aktor-aktor yang terlihat. Sehingga alangkah sempurnanya ketika peneliti selanjutnya berhasil mengupas aktor-aktor terselubung yang berpengaruh besar dalam implementasi otonomi desa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aspinall ,Edward, Mada Sukmajati, (2015), Politik Uang di Indonesia: Patr Nase dan Klientilisme pada Pemilu Legislatif 2014, Yogyakarta: PolGov
- Chalid, Pheni, (2005), “Otonomi Daerah, Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik”, Jakarta: Kemitraan
- Collier, William dan Soentoro, (1995), “Rural Development and the Decline of Traditional Villages Welfare Institution in Java”, Journal of Contemporary Asia Vol.5 No.3
- Fakih, Mansour (2004), “Bebas dari Neoliberalisme”, Yogyakarta: INSIST Press
- Faucoult ,Michael, (1980), “Truth and Power”, Suffolk: Harvester Press
- Halim, Abdul (2014), Politik Lokal, Pola, Aktor, dan Alur Dramatikalnya, Yogyakarta: LP2B.
- Hira, Jhamtani,(2008), Lumbung Pangan Menata Ulang Kebijakan Pangan, Yogyakarta: INSISTPress
- Ivanovich, Agusta, (2014), “Diskursus, Kekuasaan, dan Praktik Kemiskinan di Pedesaan”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Huda ,Ni’matul, (2015), “Hukum Pemerintahan Desa, Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Reformasi”, Malang: Setara Press Intrans Publishing
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, (1984), “Desa”, Jakarta: PN Balai Pustaka
- Kushandajani (1991), “Elit Desa Ditinjau dari Sumberdaya Kekuasaan”, Jakarta: Tesis Magister Ilmu Politik UI
- Labolo, Muhadam,(2015), Dinamika Politik Lokal dan Pemerintahan Lokal.Bogor: Ghalia Indonesia
- Lombard, Dany, (2005), Nusa Jawa III (Silang Budaya): Warisan Budaya Kerajaan-Kerajaan Konsentris, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Manan, Bagir (2001), “Menyongsong Fajar Otonomi Daerah “, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UI
- Mashab, Mashuri (2013), “Politik Pemerintahan Desa di Indonesia”, Yogyakarta: Pol Gov UGM
- Prijono , Yumiko M. DanTjiptoherianto, Prijono, (2012), *Demokrasi di Pedesaan Jawa*, Jakarta: Kosa Kata Kita.
- Saliem, Handewi Purwati, (2005), Manajemen Ketahanan Pangan di Era Otonomi Daerah dan BULOG, Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
- Samiaji, Sarosa (2012), Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Jakarta: PT Indeks
- Sen, Amartya (1992), “Inquality Reexamined”, Harvard: Harvard University Press
- Slamet, Ina E., (1965), Pokok-Pokok Pembangunan Masyarakat Desa, Jakarta: Bharata
- Sugiyono (2010), “Memahami Penelitian Kualitatif”, Bandung: ALFABETA
- Sunu ,Hardiyanta,(1997), “Michel Foucault: Bengkel Individu Modern, Disiplin Tubuh”, Yogyakarta:LKiS
- Thaha,Idris, (2004), Demokrasi Religius Pemikiran Politik Nurcholis Masjid dan Amien Rais, Jakarta: TERAJU
- Wasistiono, Sadu,(1993), *Pemilihan Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*, Bandung: Mekar Rahayu
- Yasa, G.W. Murjana, (2011), Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Partisipasi Masyarakat di Bali dalam Jurnal Ekonomi dan Sosial, Jakarta: INPUT

Jurnal:

- Letty Aziz ,Nyimas Latifah, (2016), Jurnal Penelitian Politik Volume.13 No.2, Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa, Jakarta: LIPI
- Manoppo, Viviane, (2007), Utang Luar Negeri Indonesia dalam Jurnal of Indonesian Applied Economic Volume.1 Nomor.1

- Nurbadri, S.H. (2011), "Tesis: "Konflik Batas Wilayah di Era Otonomi Daerah dan Upaya Penyelesaiannya, Studi Kasus Konflik Batas Wilayah KabupatenTebu dan Kabupaten Bungo. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ramli, Muhamad, (2013), Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pemilihan Kepala Daerah dalam Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal Volume.II Nomor.2 Juli-September
- Rudolf Yuniarto, Paulus, (2014), Jurnal Kajian Wilayah Vol.5 No.1 "Masalah Globalisasi di Indonesia:Atara Kepentingan,Kebijakan, dan Tantangan," Jakarta:LIPI
- Selfina Beli, Welhelmina, (2016), Jurnal of Government – Jog Volume.2 Nomor.1, Hidden Power dalam Pemekaran di Nusa Tenggara Timur
- Sugiono, Muhadi, (2005), Globalisasi, Global Governance, serta Prospek Governance di Dunia ke Tiga dalam Jurnal Analisis Sosial Volume 8 Nomor 3
- Ulfatul Istiqlaliyah (2014), Skripsi: "Kerjasama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Desa, Studi Kasus Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep" , Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Wahyuni ,Sri,(2014), "Tesis: "Demokratisasi Pemerintahan Desa, Studi Analisis Implementasi Demokratisasi Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Tentang Pemerintahan Daerah di Desa Kalipang Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang. Semarang: Universitas Diponegoro

Website:

- "*Otonomi Desa dan Ancaman Kapitalisme Global*"<http://www.spi.or.id/otonomi-desadan-ancaman-kapitalisme-global/> Dalam, diakses pada tanggal 21 Mei 2017 pukul 20.21 WIB
- "*Panen Raya Bawang Merah Desa Purworejo Kecamatan Ngantang*"<http://ngantang.malangkab.go.id/?p=1412>, dalam, diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 08.10 WIB

http://www.malangtimes.com/baca/16995/20170210/153231/setiap_tahun-penduduk-miskin-kabupaten-malang-meningkat/, diakses pada tanggal 22 Mei 2017 pukul 13.23 WIB

Dokumen:

Keputusan Mendagri Nomor.126 Tahun 2003

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I

Wawancara:

Wawancara dengan Kepala Desa Purworejo Ngantang tentang gambaran umum budaya Desa Purworejo pada 25 September 2017

Hasil obeservasi di lapangan oleh penulis. Pandangan tersebut tersirat ditangkap penulis dari cara para elit desa berbicara ketika ditanya tentang partisipasi masyarakat desa pada aktivitas politik, sosial, dan ekonomi desa.

Wawancara bersama Bapak Siswaji, Kepala Desa Purworejo, Ngantang Tanggal.20 September 2017 tentang budaya politik Desa Purworejo.

Wawancara bersama Penyuluh Senior dari Kementrian Pertanian Ibu Ir. Baswarsiati tentang sinkronisasi antar lembaga pemerintah dalam penyuluhan di Desa Purworejo Ngantang. Pada tanggal 15 Agustus 2017

Wawancara bersama Ketua Bidang Sosial Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Malang tentang bagaimana seharusnya koordinasi antar lembaga dalam era otonomi daerah. Pada tanggal 21. September 2017

Wawancara bersama Ketua Bidang Sosial Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Malang tentang disintegrasi antar lembaga pemerintah. Pada tanggal 21. September 2017

Wawancara bersama Ketua Gapoktan Bapak Sukowiyono pada tanggal 21 September 2017 tentang peran PT.Gudang Garam.

